



Dinas Kelautan  
dan Perikanan  
KABUPATEN SUKABUMI

# **RENCANA STRATEGIS 2016-2021**

## **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI**



**KOMPLEK PERKANTORAN CIMAJA JL. RAYA CISOLOK KM. 11  
TELP. (0266) 436423, 436424 CIMAJA - PALABUHANRATU**



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

## DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KOMPLEK PERKANTORAN CIMAJA JL. RAYA CISOLOK KM. 11 TELP/FAX (0266) 436423/436424  
Website : <http://perikanan.sukabumi.go.id>, e-mail : dislutkankab.sukabumi@gmail.com  
KARANGPAPAK - CISOLOK 43366

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**NOMOR :**

### TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 - 2021

### KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi 2016 - 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 - 2021.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum

dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021.
- KETIGA : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021.
- KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 meliputi :
- a. BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Sistematika penulisan.
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN (PERANGKAT DAERAH)  
Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, sumber daya Dinas Kelautan dan Perikanan, kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.
  - c. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis
  - d. BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan, strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan.
  - e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF  
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
  - f. BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  
Memuat indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan, yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

g. BAB VII : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Palabuhanratu**  
**Pada tanggal : Oktober 2017**

Kepala,



**Ir. H. DADANG BUDIMAN, MM**

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 196305031988031008

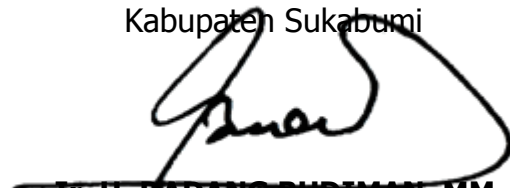
## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi 2016-2021 merupakan gambaran Visi, Misi dan Target Kinerja Kabupaten Sukabumi selama kurun waktu 6 (Tahun) tahun.

Secara umum dokumen ini menguraikan tentang gambaran program dan kegiatan beserta pagu pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran enam tahun kedepan dan merupakan rujukan dalam proses evaluasi internal yang diarahkan dalam upaya peningkatan kinerja Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi.

Selain merupakan syarat pemenuhan administratif dokumen ini juga merupakan janji kinerja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah dan rakyat secara umum dan merupakan amanat yang harus dipenuhi. Untuk itu peran serta aktif setiap sektor dan stakeholder sangat diperlukan untuk kesuksesan pencapaian sasaran yang ingin dicapai.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Sukabumi



**If. H. WADANG BUDIMAN, MM**

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 196305031988031008

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi .....	8
2.2 Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan .....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi .....	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi .....	35
<b>BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan .....	37
3.2 Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi.....	40

3.3	Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat...	49
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	54
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis .....	59
<b>BAB IV.</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 – 2021</b>	
4.1	Visi dan Misi .....	63
4.2	Sasaran dan Strategi .....	66
<b>BAB V.</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ,INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN INDIKATIF</b>	
	.....	68
<b>BAB VI.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA SASARAN RPJMD.....</b>	71
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	75



## DAFTAR TABEL

No.	<i>Judul</i>	Halaman
1.	Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi .....	23
2.	Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi Tahun 2015 .....	25
3.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi Tahun 2015 .....	26
4.	Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2015.....	27
5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 – 2015 .....	29
6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi Tahun 2011 – 2015 .....	30
7.	Matrik Peluang dan Tantangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi .....	36
8.	Analisis SWOT Identifikasi Potensi Internal dan Eksternal Pelayanan .....	39
9.	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	58
10.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi .....	59
11.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sukabumi .....	67
12.	Indikator Kinerja dan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi .....	73

## DAFTAR GRAFIK

No	<i>Judul</i>	Halaman
1.	Grafik Perkembangan PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 – 2015.....	30
2.	Grafik Perkembangan BTL Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 – 2015.....	31
3.	Grafik Perkembangan BL Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 – 2015.....	31
4.	Grafik Perkembangan Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2011 – 2015.....	32
5.	Grafik Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2011-2015.....	33

## DAFTAR GAMBAR

No.	<i>Judul</i>	Halaman
1.	Gambar 1. Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi .....	41
2.	Gambar 2. Misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 2013-2018.....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	<i>Judul</i>	Halaman
1.	Tabel 12 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi .....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sukabumi sebagai bagian integral dari Pembangunan Daerah merupakan salah satu sektor prioritas yang bernilai strategis. Hal ini dikarenakan sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya potensial lainnya cukup tersedia untuk dikembangkan.

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan diperlukan suatu strategi perencanaan yang menjadi acuan kinerja dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada umumnya.

Rencana Strategis ini merupakan jabaran Visi dan Misi Bupati Sukabumi dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun kedepan dan merupakan salah satu bentuk komitmen kinerja yang harus dipedomani dan dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya dokumen Renstra ini keberlanjutan dan konsistensi kebijakan pembangunan sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat lebih terjamin dengan adanya indikator kinerja yang terukur dan lebih terarah.

### **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4)
31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45)
32. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 45);
33. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 69);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai penjabaran Visi, Misi dan Strategi Kepala Daerah dalam hal pembangunan kelautan dan perikanan

2. Sebagai pedoman dalam rangka menyusun program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan perikanan bagi kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Sukabumi.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 antara lain :

1. Terlaksananya pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sukabumi yang dilakukan secara optimal.
2. Terlaksananya keterpaduan, sinergitas, keberlanjutan perencanaan pembangunan perikanan.
3. Terlaksananya pembangunan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun sasaran disusunnya Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi adalah:

1. Tersusunnya rencana kerjan tahunan pembangunan kelautan dan perikanan di kabupaten sukabumi.
2. Tersusunnya Dokumen Anggaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan.
3. Terlaksanya Evaluasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra mengacu kepada visi dan misi bupati kabupaten sukabumi dilakukan melalui program:

1. Pengembangan perikanan tangkap.
2. Pengembangan perikanan budidaya.
3. Peningkatan kesejahtraaan pelaku perikanan.

Dan didukung program pelayananan administasi perkantoran dan program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 3.2 Sumberdaya PD
- 3.3 Kinerja Pelayanan PD
- 3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

## **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 1.5 Penentuan Isu-isu Strategis

## **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

## **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK**

### **SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

## **BAB VI. INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

## **BAB VII. PENUTUP**

**GAMBARAN PELAYANAN SKPD****2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. Adapun tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten sukabumi sebagai berikut :

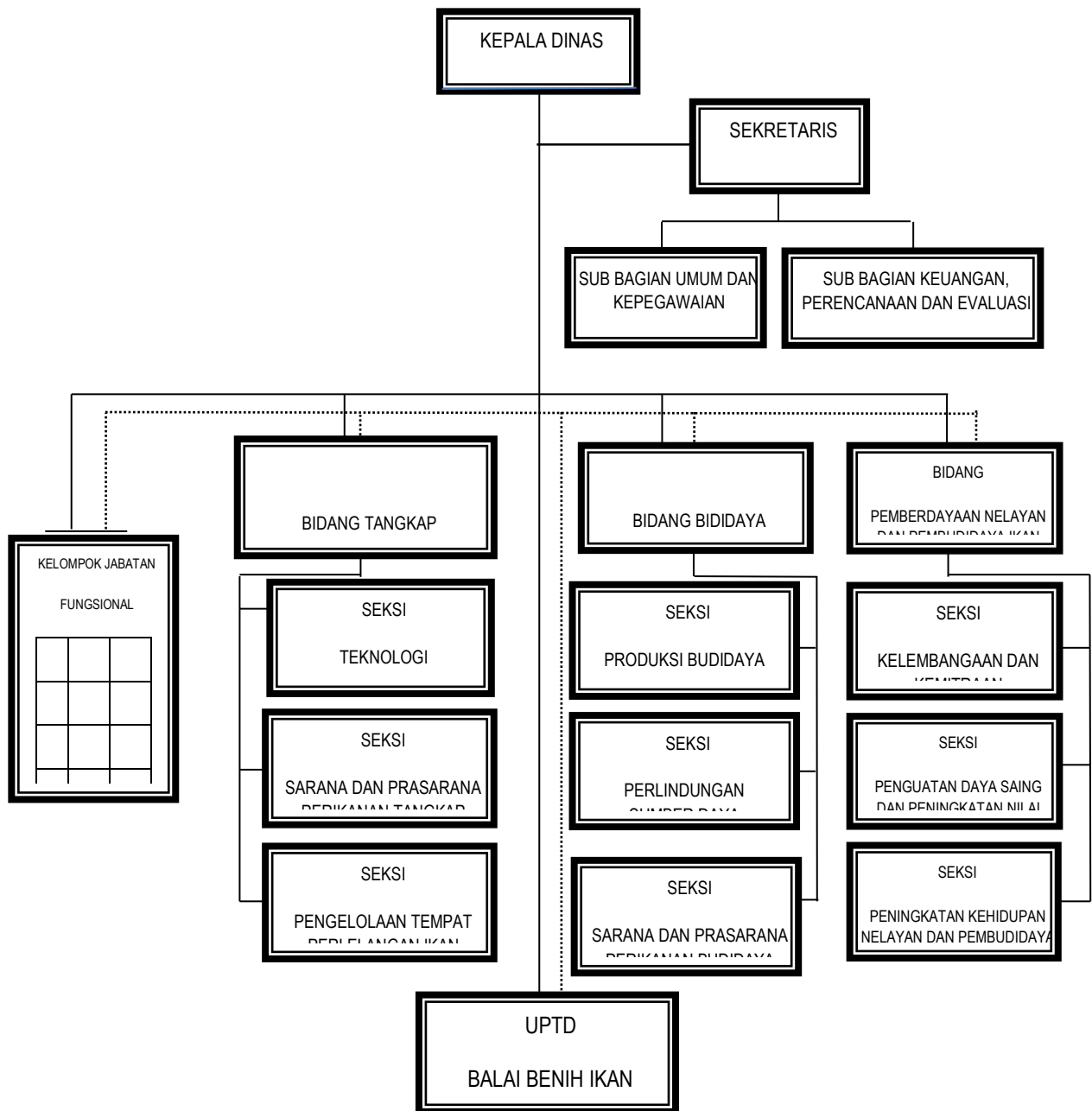
1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kelautan dan perikanan
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan, Bidang pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, bidang perikanan budidaya, bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan bidang perikanan tangkap
4. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan
5. Pembinaan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan
6. Pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan perizinan oleh Dinas terkait
7. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan
8. Pembinaan pengelolaan wilayah konservasi kelautan dan perikanan
9. Pembinaan Unit Pelaksanan Teknis Dinas
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
12. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi selengkapnya terdiri atas :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, dalam pelaksanaan Tugasnya dibantu oleh:
  - Kepala Seksi Teknologi Perikanan Tangkap
  - Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
  - Kepala Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
4. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang Budidaya, dalam pelaksanaan Tugasnya dibantu oleh:
  - Kepala Seksi Teknologi Perikanan Budidaya
  - Kepala Seksi Sarana, Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
  - Kepala Seksi Perbenihan
5. Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil, dalam pelaksanaan Tugasnya dibantu oleh:
  - Kepala Seksi Kelembagaan dan Kemitraan
  - Kepala Seksi Penguatan Daya Saing dan Peningkatan Nilai Tambah Produk
  - Kepala Seksi Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan ( UPTD BBI),
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja  
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi  
berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 80 Tahun 2017.**



Susunan Organisasi Dinas selengkapnya , terdiri dari :

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan.
2. Sekretariat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

Penyusunan Rencana dan Program Kerja Sekretariat

- a. Penyusunan rencana dan program kerja sekretariat
- b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi.
- c. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan
- d. Pelayanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Dinas
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di lingkungan Dinas
- f. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan
- g. Pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
- h. Pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
- i. Pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
- j. Pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas
- k. Pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas
- l. Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- n. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
- p. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh :

- 2.1 *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian* ; bertugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian, dengan fungsi :
  - a) Pengumpulan dan pengolahan data di bidang umum dan kepegawaian
  - b) Penyusunan Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian
- d) Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan
- e) Pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan
- f) Penyusunan bahan neraca barang milik daerah di Lingkungan Dinas
- g) Pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di Lingkungan Dinas
- h) Pengelolaan Ketatausahaan dan kearsipan
- i) Pengelolaan kepegawaian
- j) Pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
- l) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
- m) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas, dan
- n) Pelaporan hasil pelaksanaan

2.2. *Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi* ; bertugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang keuangan, perencanaan dan evaluasi dengan fungsi :

- a) Penyusunan Rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- b) Pengumpulan dan Pengolahan data Keuangan, perencanaan dan evaluasi
- c) Pengumpulan dan pengelolaan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas
- d) Pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan dilingkungan Dinas
- e) Penyusunan laporan keuangan Dinas
- f) Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas
- g) Penyusunan rencana dan program kerja Dinas
- h) Pembinaan dan fasilitasi teknis dibidang perencanaan dan program di lingkungan Dinas
- i) Pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan Dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan
- j) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas



- k) Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
  - l) Penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
  - m) Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta pelayanan publik di lingkungan Dinas
  - n) Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas
  - o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
  - p) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya
  - q) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas, dan
  - r) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
3. Bidang Perikanan Tangkap, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang perikanan tangkap dengan melaksanakan fungsi :
- a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja Bidang Perikanan Tangkap
  - b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang Teknologi Perikanan Tangkap; Bidang Sarana dan Prasaran Perikanan Tangkap; dan Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
  - c. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Teknologi Perikanan Tangkap; Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
  - d. Pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan dibidang Teknologi Perikanan Tangkap; Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
  - e. Pembinaan dan Pengembangan perikanan tangkap nelayan kecil
  - f. Fasilitasi akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi nelayan kecil
  - g. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
  - h. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya
  - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugasnya
  - j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dibantu oleh :

- 3.1 *Seksi Teknologi Perikanan Tangkap*; bertugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dalam bidang Teknologi Perikanan Tangkap. Seksi Teknologi Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Rencana dan Program Kerja Seksi Teknologi Perikanan Tangkap
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang teknologi perikanan tangkap
- c) Penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang teknologi perikanan tangkap
- d) Pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengendalian dinamika teknologi perikanan tangkap
- e) Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi pengembangan teknologi perikanan tangkap
- f) Pelaksanaan pengembangan kaji terap teknologi perikanan tangkap
- g) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknologi penangkapan ikan bagi nelayan kecil
- h) Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan bagi nelayan kecil dalam pengembangan teknologi penangkapan ikan
- i) Pelaksanaan fasilitasi pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi penangkapan ikan kepada nelayan kecil
- j) Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan perairan umum
- k) Pelaksanaan pengembangan teknologi penangkapan ikan perairan umum
- l) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- m) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya
- n) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
- o) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3.2 *Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap*; bertugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dalam bidang Perikanan Tangkap dibidang Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap. Seksi ini mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Rencana dan Program Kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi dibidang Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
- d) Pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengendalian Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

- e) Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
- f) Pelaksanaan penataan dan pengembangan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan
- g) Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi sarana dan prasarana perikanan tangkap
- h) Pelaksanaan penataan dokumen kapal perikanan tangkap nelayan kecil
- i) Pelaksanaan fasilitasi pengadaan kapal perikanan skala kecil dan kelengkapannya
- j) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- k) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya
- l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
- m) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3.3 *Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan* ; bertugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dalam bidang Perikanan Tangkap dibidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Seksi ini mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Rencana dan Program Kerja Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan pengelolaan tempat pelelangan ikan
- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi dibidang pengelolaan tempat pelelangan ikan
- d) Pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengendalian pengelolaan tempat pelelangan ikan
- e) Pelaksanaan pembinaan manajemen pelelangan ikan
- f) Pelaksanaan pembinaan pengusaha perikanan dan bakul
- g) Pelaksanaan pelayanan retribusi pelelangan hasil perikanan
- h) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- i) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya
- j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
- k) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

4. Bidang Perikanan Budidaya, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang perikanan budidaya dengan melaksanakan fungsi :
- a) Penyusunan Rencana dan Program Kerja Bidang Perikanan Budidaya
  - b) Pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan dibidang teknologi perikanan budidaya
  - c) Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi perikanan budidaya; bidang sarana dan prasarana budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan; dan bidang perbenihan
  - d) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang teknologi perikanan budidaya; bidang sarana dan prasarana budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan; dan bidang perbenihan
  - e) Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya
  - f) Pendampingan usaha pembudidaya ikan skala kecil
  - g) Fasilitasi akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi pembudidaya ikan skala kecil
  - h) Pengkajian bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha perikanan dibidang pembudidaya ikan
  - i) Pengkoordinasian perekayasa teknologi perbenihan
  - j) Pengkoordinasian pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI)
  - k) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
  - l) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya
  - m) Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
  - n) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahkan :

*4.1 Seksi Teknologi Perikanan Budidaya* ; bertugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dalam bidang Teknologi Perikanan Budidaya dan melaksanakan fungsi :

- a) Penyusunan Rencana dan Program Kerja Seksi Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya
- c) Penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi, fasilitasi pembinaan dan evaluasi dibidang teknologi perikanan budidaya

- d) Pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengendalian teknologi perikanan budidaya
- e) Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi perikanan budidaya
- f) Pelaksanaan diseminasi teknologi terapan budidaya ikan
- g) Pelaksanaan kajiterap teknolgi perikanan budidaya
- h) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan
- i) Pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan pembudidaya ikan skala kecil dalam pengembangan teknologi budidaya ikan
- j) Pelaksanaan fasilitasi pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada pembuidadaya
- k) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- l) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan Cara Pembesaran Ikan Yang Baik
- m) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- n) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas, dan
- o) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

*4.2 Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan ;* bertugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang Sarana dan Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan melaksanakan fungsi :

- a) Penyusunan Rencana dan Program Kerja Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan Sarana dan Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi dibidang Sarana dan Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- d) Pelaksanaan, Pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengendalian Sarana dan Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

- e) Penyusunan, Perencanaan dan memetakan kawasan perikanan budidaya untuk pengembangan komoditi unggulan berdasarkan potensi wilayah berdasarkan RTRW
- f) Pengumpulan data, identifikasi, analisis dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana UPR
- g) Pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan
- h) Pelaksanaan oengujian baku air dikawasan budidaya ikan
- i) Pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit ikan
- j) Pelaksanaan pelatihan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
- k) Pelaksanaan pengawasan peredaran pakan dan obat ikan kimia dan Biologi (OIKB)
- l) Pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisi dan pengembangan sarana dan prasarana unit pembesaran
- m) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- n) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya
- o) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
- p) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

*4.3 Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan ;* bertugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang Sarana dan Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan melaksanakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana program kerja seksi perbenihan
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan teknis dibidang perbenihan
- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi dibidang perbenihan
- d) Pelaksanaan perekayasa teknologi perbenihan
- e) Pelaksanaan pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI)
- f) Pengumpulan data, identifikasi, analisis kebutuhan induk
- g) Pelaksanaan penyediaan induk ikan yang bermutu
- h) Pelaksanaan penyediaan benih ikan berkualitas
- i) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- j) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya
- k) Pelaksaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas

- l) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
5. Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil dengan melaksanakan fungsi :
- a) Penyusunan Rencana dan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil
  - b) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang kelembagaan dan kemitraa; penguatan daya saing dan peningkatan nilai tambah produk dan peningkatan kehidupan nelayan pembudidaya ikan
  - c) Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil
  - d) Pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan kelembagaan dan kemitraan; penguatan daya saing dan peningkatan nilai tambah produk dan peningkatan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan
  - e) Pembinaan dan pengembangan dibidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil
  - f) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
  - g) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya
  - h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
  - i) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan membawahkan :

*5.1 Seksi Kelembagaan dan Kemitraan* ; bertugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dalam bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil dan melaksanakan fungsi :

- a) Penyusunan Rencana dan Program Kerja Seksi Kelembagaan dan Kemitraan
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan Kelembagaan dan Kemitraan
- c) Penyusunan bahan kajian teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi dibidang Kelembagaan dan Kemitraan
- d) Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengendalian Kelembagaan dan Kemitraan
- e) Pelaksanaan pendataan pembudidaya ikan dan nelayan
- f) Pelaksanaan pembuatan kartu nelayan dan pembudidaya ikan

- g) Pelaksanaan peningkatan kelas kelompok pembudidaya ikan dan nelayan
- h) Pelaksanaan pembinaan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan
- i) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama kelompok pembudidaya ikan dan nelayan
- j) Pelaksanaan fasilitasi akses permodalan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan
- k) Pelaksanaan fasilitasi badan hukum kelompok nelayan dan pembudidaya ikan
- l) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- m) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya
- n) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
- o) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

5.2 *Seksi Penguatan Daya Saing dan Peningkatan Nilai Tambah dan Produk ;* bertugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil dan melaksanakan fungsi :

- a) Penyusunan Rencana dan Program Kerja Seksi Penguatan Daya Saing dan Peningkatan Nilai Tambah Produk
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan Seksi penguatan daya saing dan peningkatan nilai tambah produk
- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di penguatan daya saing dan peningkatan nilai tambah produk
- d) Pelaksanaan diversifikasi produk budidaya dn perikanan tangkap
- e) Pelaksanaan fasilitasi penanganan produk perikanan diatas kapal dan produk budidaya
- f) Pelaksanaan fasilitasi penanganan pasca panen produk perikanan
- g) Pelaksanaan pembinaan sertifikasi kelayakan pengolahan ikan
- h) Pelaksanaan perbaikan kemasan produk perikanan
- i) Pelaksanaan fasilitasi jaringan pemasaran produk kemasan perikanan
- j) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- k) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya
- l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas



m) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

*5.3 Seksi Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Pembudidaya Ikan; bertugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil dan melaksanakan fungsi :*

- a) Penyusunan Rencana dan Program Kerja Seksi Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan bidang peningkatan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan
- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi dibidang bidang peningkatan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan
- d) Pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan, peningkatan dan pengendalian bidang peningkatan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan
- e) Pelaksanaan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan dan pembudidaya ikan
- f) Pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan rumah tinggal layak huni bagi nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil
- g) Pelaksanaan dan pengendalian subsidi BBM bagi nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil
- h) Pelaksanaan fasilitasi beras bagi nelayan
- i) Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan asuransi bagi nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil
- j) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- k) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
- l) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

## **2.2 Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan**

### **a. Sumberdaya Alam**

Sumber daya perikanan darat, payau dan laut merupakan modal dasar pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sukabumi. Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan umumnya dapat dibedakan menjadi

sumberdaya yang terbaharukan (*renewable resources*) seperti sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap, mangrove, terumbu karang, padang lamun, dll dan sumberdaya yang tidak terbaharukan (*non renewable resources*) seperti minyak bumi dan berbagai jenis mineral. Sumberdaya yang terbaharukan umumnya sudah dimanfaatkan seluruhnya dan salah satu sumberdaya tidak terbaharukan yang mulai dimanfaatkan adalah air laut dalam atau “*Deep sea water*”.

Panjang pesisir di Kabupaten Sukabumi adalah 117 Km dengan garis pantai 4 mil laut, sedang luas *fishing ground* atau daerah penangkapan diperkirakan seluas 720 Km<sup>2</sup> yang tersebar di 9 kecamatan pesisir ; Palabuhanratu, Cisolok, Cikakak, Simpenan, Ciemas, Ciracap, Cibitung, Surade dan Tegalbuleud. Dengan potensi tersebut sangat dimungkinkan untuk mengembangkan usaha penangkapan dan budidaya laut. Luas areal yang telah dikembangkan untuk pengembangan perikanan air tawar umumnya tersebar di 47 kecamatan dengan komoditas ikan konsumsi meliputi ; ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan bawal, ikan patin, ikan gurame, ikan nilem, ikan tawes, ikan sepat, ikan tambakan dan lainnya. Sementara ikan hias yang banyak dihasilkan adalah ; ikan baster, ikan koi, ikan komet, ikan red devil, ikan metalik, ikan sudager, ikan golsom, ikan grass carp dan ikan manvis. Biota laut yang dominan terdapat adalah ikan–ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, cumi-cumi, udang, dan rumput laut. Lokasi-lokasi pengembangan budidaya ikan air tawar maupun laut selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

Luas areal pengembangan perikanan darat, payau dan perairan umum dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Potensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sukabumi

No.	Jenis Usaha	Potensi	Keterangan
1.	Laut - Panjang pantai - <i>Fishing ground</i> - Garis pantai	117 Km 720 Km <sup>2</sup> 4 Mil Laut	Tersebar di Palabuhanratu, Cisolok, Cikakak, Simpenan, Surade, Ciemas, Cibitung, Ciracap, Tegalbuleud
2.	Payau - Tambak	1.400 Ha	Ciemas, Ciracap
3.	Perikanan darat - Kolam air tenang - Kolam air deras	8.684 Ha 343 Ha	Tersebar di 47 Kecamatan Tersebar di 10 Kecamatan

No.	Jenis Usaha	Potensi	Keterangan
4.	- Sawah perikanan Perairan Umum - Sungai - Rawa - Situ	31.001 Ha 747.5 Km 35 Ha 149.6 Ha	Tersebar di 47 Kecamatan Tersebar di 47 Kecamatan Ciracap, Tegalbuleud Kadudampit, Nyalindung, Parakansalak, Wr. Kiara, Waluran, Cikidang

Dari sembilan kecamatan pesisir, dua kecamatan diantaranya (*Kecamatan Ciracap dan Ciemas*) memiliki potensi satwa penyu yang bertelur di 9 lokasi peneluran, yaitu : (1) Pangumbahan, (2) Hujungan, (3) Karang Dulang, (4) Legon Matahiang, (5) Citirem (6) Batu Handap, (7) Cibulakan, (8) Cebek, dan (9) Cikepuh. Dalam pengelolaannya, delapan lokasi dikelola oleh BKSDA (Kementerian Kehutanan) dan satu lokasi yaitu Pantai Pangumbahan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Dari enam jenis penyu yang terdapat di Indonesia hanya Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) yang mendominasi seluruh lokasi peneluran penyu di Kabupaten Sukabumi. Oleh sebab itu satwa penyu hijau dijadikan sebagai lambang Kabupaten Sukabumi. Pantai Pangumbahan memiliki nilai yang sangat strategis terkait dengan upaya pelestarian penyu hijau (*Chelonia mydas*). Hal ini ditunjukkan oleh dokumen resmi IUCN yang dikeluarkan pada tahun 2004 mengenai status populasi penyu hijau (*Chelonia mydas*) di dunia. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa Pantai Pangumbahan yang terletak di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari tiga lokasi di Indonesia dan 30 lokasi lainnya yang tersebar di seluruh dunia yang menjadi indeks lokasi pengamatan kondisi populasi penyu hijau. Dari lokasi yang memiliki satwa liar yang dilindungi dengan status terancam punah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi menunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi sebagai pengelola berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 523/Kep.638/Dislutkan/2008 tentang Penunjukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi sebagai Pengelola Kawasan Penyu Pantai Pangumbahan. Dalam rangka pembentukan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka

Bupati Sukabumi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 523/Kep.639-Dislutkan/2008 tentang Pecadangan Kawasan Penyu Pantai Pangumbahan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan Status "**Taman Pesisir**". Berdasarkan pertimbangan terhadap arti penting pelestarian penyu dan habitatnya serta dampak lanjutan dari upaya tersebut terhadap sebagian masyarakat pesisirnya, maka Pemerintah Kabupaten Sukabumi secara serius melakukan pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi penyu di pantai Pangumbahan.

**b. Sumberdaya Manusia Aparatur**

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai pusat pengembangan perikanan dan kelautan di daerah. Potensi Sumberdaya Manusia bidang kelautan dan perikanan masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari kemampuan nelayan atau pembudidaya ikan dalam penguasaan teknologi budidaya atau penangkapan yang secara umum masih bersifat tradisional. Begitupun di bidang aparatur, aparatur yang memiliki kompetensi teknis kelautan dan perikanan masih sangat terbatas, sangat tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang begitu luas. Untuk itu kedepannya pengalokasian tenaga teknis bidang kelautan dan perikanan perlu diprioritaskan.

Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2015 adalah 93 orang yang terdiri dari 53 orang PNS , 40 Tenaga Harian Lepas (THL).

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2015

No	Uraian	Kualifikasi Pendidikan Terakhir								Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	DIII	DIV	S1	S2	S3	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	-	1

2.	Sekretariat	-	-	5	-	2	5	-	-	<b>12</b>
3.	Bidang Perikanan Budidaya	-	1	1		1	1	1	-	<b>5</b>
4.	Bidang Perikanan Tangkap	-	-	2		1	1	2	-	<b>6</b>
5.	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	-	1	1	-	2	2	-	<b>6</b>
6.	Bidang Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	-	-	3	1	1	1	1	-	<b>7</b>
7.	UPTD	-	2	7	1	1	4	1	-	<b>15</b>
	<b>Total</b>	-	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	-	<b>52</b>

Tabel 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2015

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan	-	1	<b>1</b>
2.	Sekretariat	9	3	<b>12</b>
3.	Bidang Perikanan Budidaya	4	1	<b>5</b>
4.	Bidang Perikanan Tangkap	6	-	<b>6</b>
5.	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2	4	<b>6</b>
6.	Bidang Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	6	1	<b>7</b>
7.	UPTD	15	-	<b>15</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>41</b>	<b>17</b>	<b>52</b>

### C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan/operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi antara lain ; Komplek gedung perkantoran, kendaraan dinas operasional, sarana perkantoran, TPI/PPI, BBI, Pasar Ikan dan

sarana konservasi penyu. Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2015

NO	SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	VOLUME
1.	Lahan BBI Cimaja dan Lahan Bangunan Kantor	M2	18.940.00
2.	Lahan Konservasi Penyu	M2	585.400.00
3	Bangunan UPTD TPI	M2	212 lt 2
4	TPI Cisolok	M2	649
5	TPI Cibangban	M2	48
6	TPI Ciwaru	M2	197
7	TPI Minajaya	M2	35
8	Bangunan pasar	Unit	1
9	Pusat Promosi Lembursitu	Unit	1
10	Sentra Pengolahan Pindang Bantargadung	Unit	1
11	Bangunan Konservasi Penyu Pangumbahan	unit	1
12	Pabrik Es	Unit	1
13	Kendaraan Dinas Roda Dua	Unit	63
14	Kendaraan Dinas Roda Empat	Unit	12
15	Kendaraan Pemasaran Roda Tiga	Unit	1
16	Kendaraan Pemasaran Roda Empat	Unit	2
17	Sentra Pengolahan Pindang Bantargadung	Unit	1
18	Komputer PC	Unit	21
19	Laptop/Note Book	Unit	15
20	Saluran Telepon	line	3
21	Saluran Internet	line	1

### 2.3 Kinerja Pelayanan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pelayanan bidang kelautan dan perikanan mengacu kepada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.44/MEN/2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota. Terdapat delapan jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi yaitu :

- a) Memberikan Rekomendasi Teknis Perizinan bidang kelautan dan perikanan;
- b) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kelautan dan Perikanan

- c) Menyelenggarakan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kelautan dan Perikanan
- d) Menyelenggarakan Peningkatan Kualitas Hasil Perikanan
- e) Menyediakan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan
- f) Menyelenggarakan Bimbingan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
- g) Menyediakan Informasi Peluang Usaha dan Investasi Bidang Kelautan dan Perikanan
- h) Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan Penerapan teknologi Penangkapan Ikan, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan

Dari kedelapan jenis pelayanan dasar tersebut pada umumnya telah dapat dilaksanakan meskipun secara kuantitatif belum memenuhi batasan indikator pencapaian yang ditetapkan. Kondisi tersebut disebabkan antara lain oleh :

1. Belum dibuatnya Keputusan Bupati mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan Dan Perikanan yang mengacu pada SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP/44/MEN/2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sehingga belum dijadikan rujukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
2. Pencapaian standar Pelayanan Minimal tersebut sangat dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personil fungsional yang secara spesifik sangat menentukan tingkat pencapaian setiap indikator yang harus dilaksanakan

Tingkat pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi berdasarkan target Renstra periode sebelumnya adalah seperti disajikan dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kab. Sukabumi Tahun 2011 - 2015

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN										
		2011		2012		2013		2014		2015		
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Terkelolanya Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan yang Berkelanjutan	Jumlah Satwa/biota yang dilindungi	200.483 ekor	143.417	220.531 ekor	76.036	242.584 ekor	190.533 ekor					
	Rasio penyu yang dilestarikan							80%	89,96%	85%	87,67%	
	Jumlah perairan umum daratan yang menerapkan Culture Base Fishery	4	4	4	4	4	4	6	2	8	13	
	Jumlah Penurunan bagan Tancap	80	4	70	80	60	70					
	Aplikasi alat tangkap ramah lingkungan							10	2	15	9	
Meningkatnya Produktivitas Kelautan dan Perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	8.760	8.160	8.865	9.258,77	8.971	9.814	9.079	10.935,24	9.188	13.790,41	
	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	4.500	3.071,03	5.277	5.730,93	6.007	13.092	18.000	20.820,49	24.000	29.551,40	
	Jumlah Produksi pengolahan hasil perikanan (Ton)	3.602	5.900	6.714	8.454	7019	11.096	7.324	13.005	7.690	15.571	
	Jumlah Produksi benih ikan Konsumsi (ekor)	2.113.170.380	1.603.144.000	2.324.487.420	1.989.243.160	2.556.936.160	2.576.640.000	2.186.167.000	3.358.595.700	2.406.983.000	3.700.777.850	
	Jumlah produksi ikan hias					498.965	78.463.000	82.169.850	92.587.600	86.278.342	93.869.700	
	Konsumsi Ikan Per kapita	21.65	20.83	22.52	21.27	23.42	23.28	24.36	24.38	25.38	25.60	
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Ikan	Jumlah SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) Nelayan)					100	100	100	300	200	200	
	Jumlah Listrik Nelayan					100	100	100	517	350	442	
	Jumlah RTP/RTBP Kelautan dan Perikanan	37.742	36.738	39.835	25.389							
	Peningkatan Pendapatan :											
	Nelayan					10%	8,13%	10%	26.50%	10%	0,76%	
	Pembudidaya					10%	63,49%	10%	36,37%	10%	9,92%	
	Pengolah					10%	23,74%	10%	38,04%	10%	4,49%	

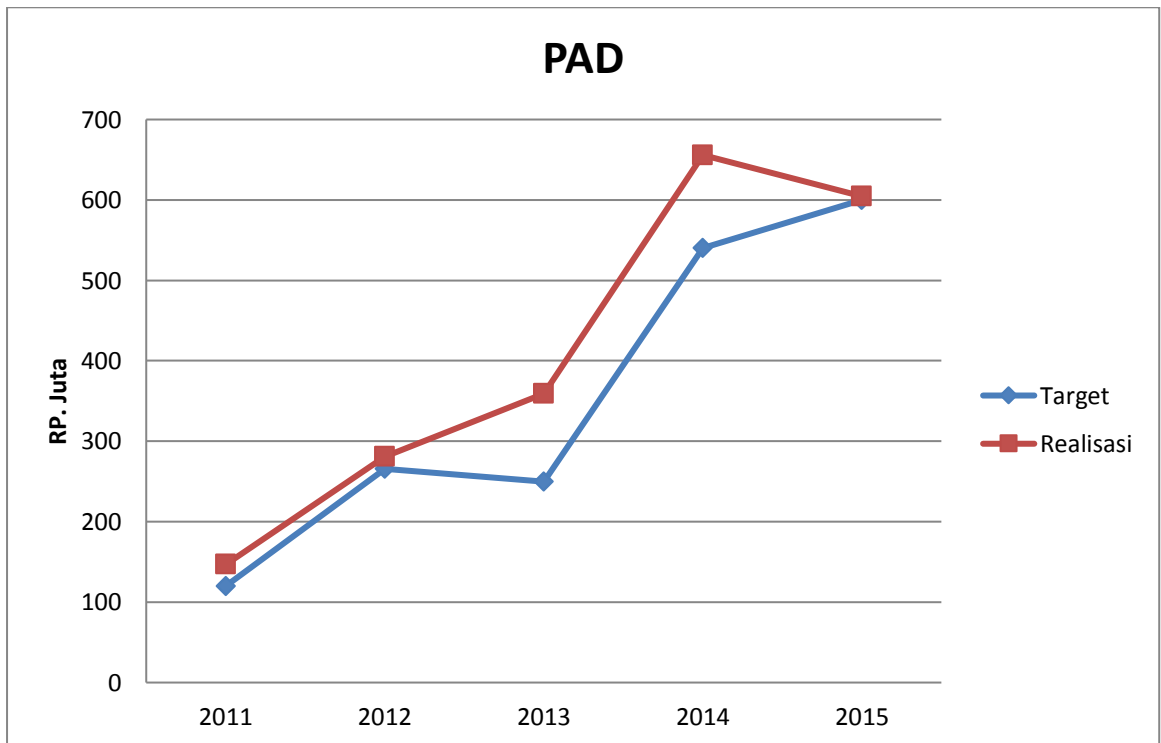


Sedangkan besaran anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi dalam kurun waktu 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 6.

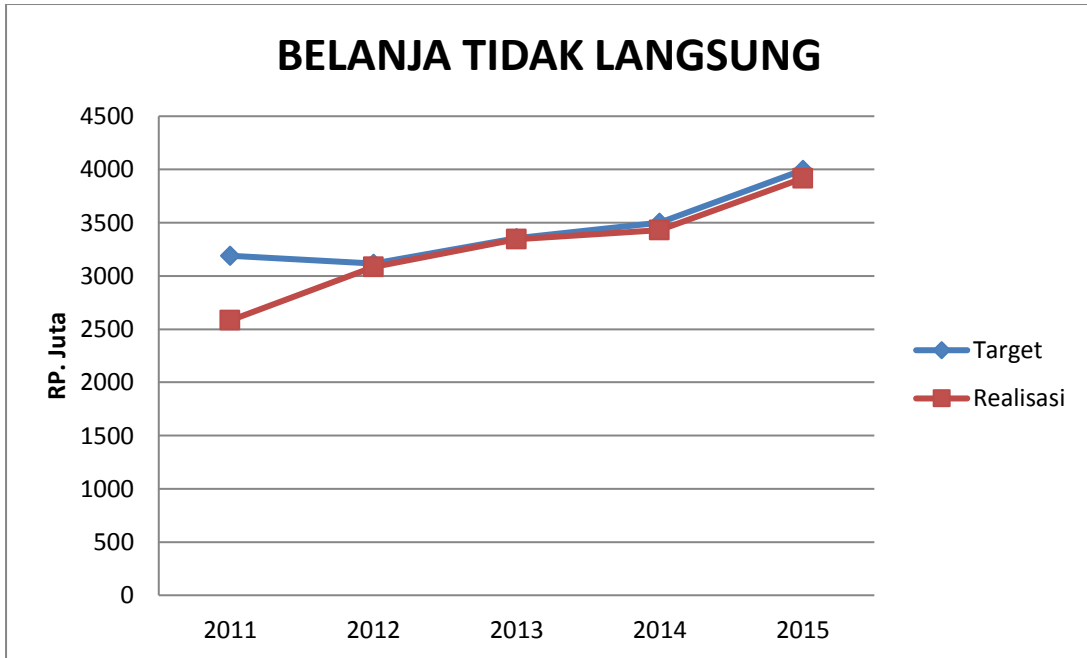
Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 – 2015

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (Rp.juta)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>120</b>	<b>266</b>	<b>250</b>	<b>540</b>	<b>600</b>	<b>146,7</b>	<b>280,8</b>	<b>359,1</b>	<b>656,1</b>	<b>604,2</b>	<b>122,3</b>	<b>105,6</b>	<b>143,6</b>	<b>121,4</b>	<b>100,7</b>	<b>120</b>	<b>114,4</b>
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	120	266	250	540	600	146,7	280,8	359,1	656,1	604,2	122,3	105,6	143,6	121,4	100,7	120	114,4
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>16.965,6</b>	<b>14.885,6</b>	<b>18.333,5</b>	<b>18.251,3</b>	<b>16.277,8</b>	<b>15.940,4</b>	<b>12.631,6</b>	<b>17.089,2</b>	<b>17.969,9</b>	<b>16.077,7</b>	<b>93,9</b>	<b>84,9</b>	<b>93,2</b>	<b>98,5</b>	<b>98,8</b>	<b>(171,9)</b>	<b>34,3</b>
<i>Belanja Tidak Langsung</i>	3.187,7	3.116	3.357,3	3.498,9	3.994,6	2.581,8	3.081,6	3.344,5	3.429,9	3.916,5	89,5	98,9	99,6	98,0	98,0	201,7	333,7
<i>Belanja Langsung</i>	13.777,9	11.769,6	14.976,2	14.752,4	12.283,3	13.088,7	9.550	13.744,7	14.540	12.161,2	95	81,1	91,8	98,6	99	(373,7)	(231,9)
Total			-	-	-												

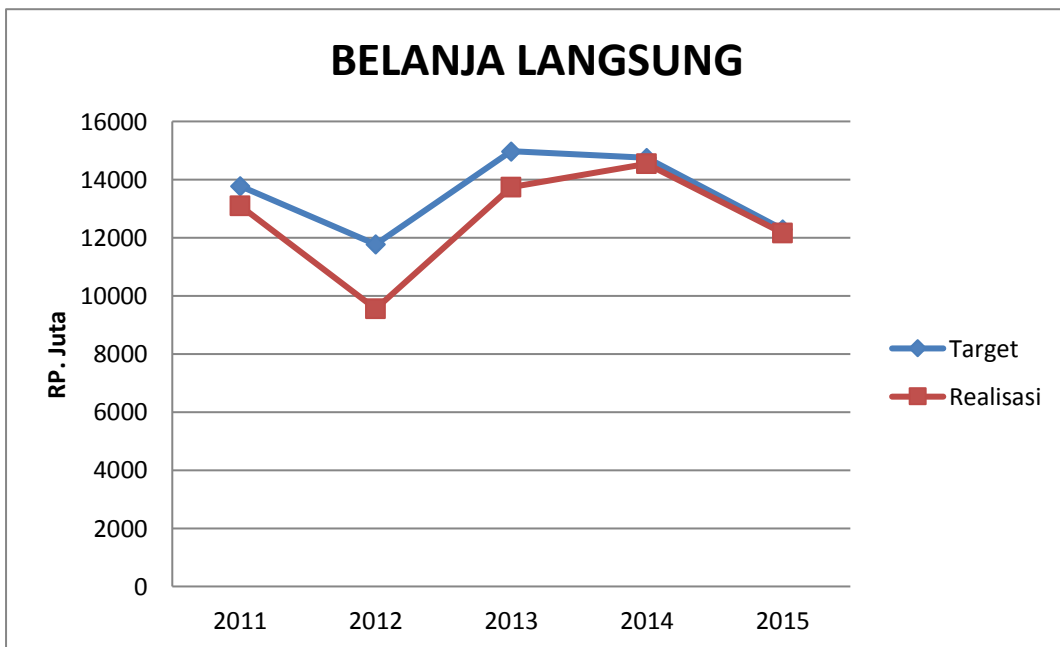
Grafik 1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi Tahun 2011 – 2015



Grafik 2. Perkembangan Belanja Tidak Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi Tahun 2011 – 2015



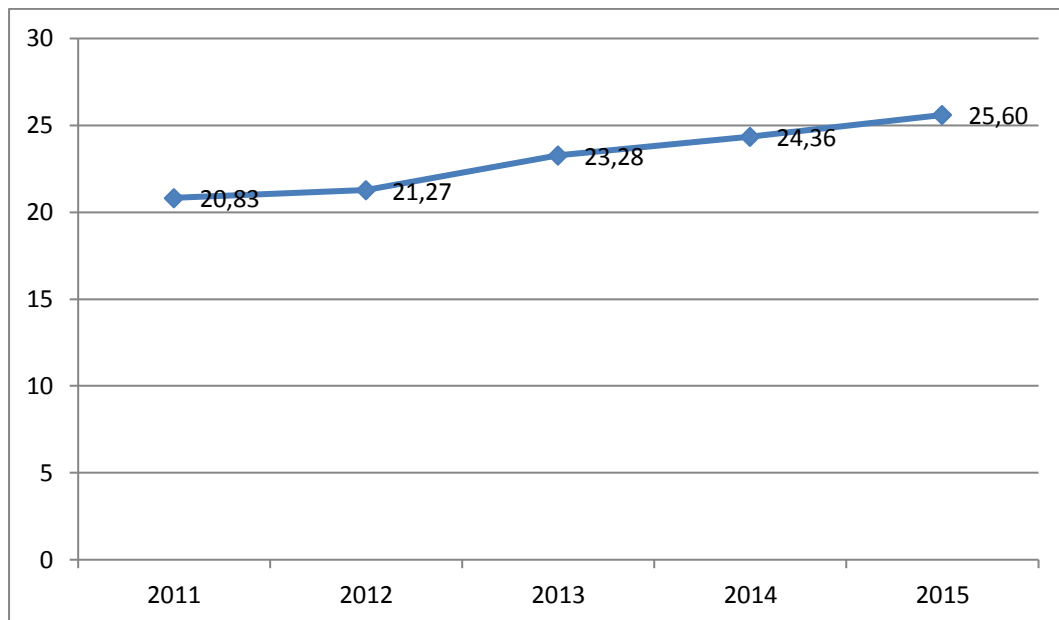
Grafik 3. Perkembangan Belanja Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi Tahun 2011 – 2015



Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dalam kurun waktu 2011 – 2015 juga antara lain dapat terlihat dari perkembangan produksi sektor kelautan dan perikanan tahun 2011 – 2015 dan tingkat konsumsi ikan perkapita serta prestasi yang telah dicapai baik oleh Pemda Kabupaten Sukabumi

atau pun oleh masyarakat kelautan dan perikanan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. Data mengenai perkembangan produksi kelautan dan perikanan dan tingkat konsumsi ikan perkapita tahun 2011 – 2015 disajikan pada Grafik di bawah ini.

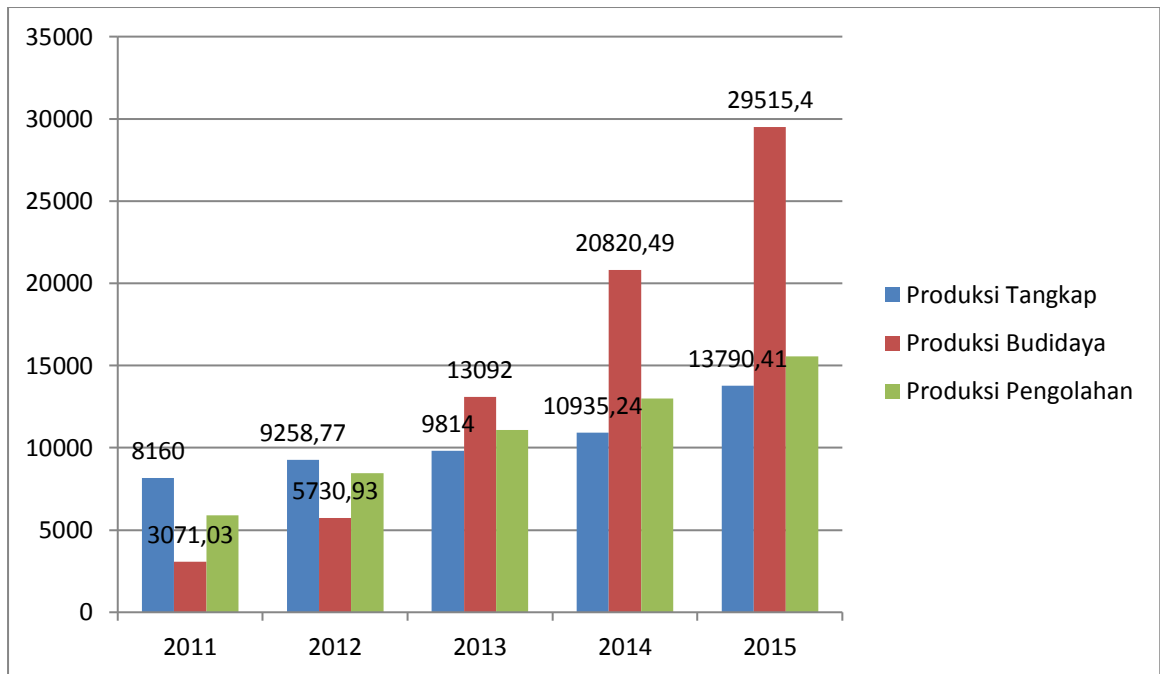
Grafik 4. Perkembangan Konsumsi Ikan Tahun 2011 – 2015 (Kg/Org/Th)



Dari grafik tersebut terlihat bahwa tingkat konsumsi ikan perkapita mengalami kenaikan dari tahun ke tahun walaupun klo melihat dari target propinsi maupun nasional masih dibawah rata-rata. Hal ini dikarenakan masyarakat kabupaten sukabumi sudah bisa memilih aneka produk kelautan dan perikanan yang lebih bervariasi. Bukan hanya ikan-ikan segar yg bisa langsung dikonsumsi tapi berbagai produk olahan perikanan seperti nugget, otak-otak, abon ikan, baso ikan dan jenis produk olahan ikan lainnya sehingga dapat meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat sukabumi.

Perkembangan produksi kelautan perikanan lima tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 5 berikut.

Grafik 5. Perkembangan Produksi Kelautan dan Perikanan 2011-2015 (Ton)



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa produksi Kelautan dan Perikanan khususnya perikanan budidaya mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2014 dan 2015 dengan jumlah produksi 20.820,49 ton dan 29.515,40 hal ini dikarenakan banyaknya pembudidaya yang telah memiliki sertifikat CBIB maupun CPIB-nya sehingga kualitas para pembudidaya dan produksinya menjadi lebih baik, walaupun dari segi lahan budidaya tidak mengalami penambahan. Produksi olahan ikan yang setiap tahun mengalami peningkatan yang rata-rata stabil, terus melakukan inovasi produk olahan yang lebih baik dengan dibangunnya Rumah kemasan dan sentra olahan perikanan. Produksi perikanan tangkap berdasarkan grafik diatas mengalami peningkatan dari tahun ketahun walaupun prosentasi peningkatannya antara 1-5%. Hal ini membuktikan bahwa nelayan kabupaten sukabumi masih mampu mengeksploitasi sumberdaya yang ada di wilayah pesisir kabupaten sukabumi dengan kapal dan alat tangkap yang masih bisa dibilang masih tradisional.

Adapun data prestasi atau penghargaan yang telah dicapai antara lain :

1. “Juara I Tingkat Provinsi Jawa Barat” Kelompok Budidaya Rumput Laut atas nama “Kelompok Citra Indah” Desa Loji Kecamatan Simpenan.

2. “Gemarikan Award” Kategori Perorangan Tingkat Nasional atas nama Yudhi Widarsono Basuki UKM Riysa (Olahan *Fish Jelly*) Desa Wangunreja Kecamatan Nyalindung.
3. “Juara II Tingkat Nasional Lomba Inovasi Pengembangan Produk Pengolahan” atas nama “Kelompok Saluyu” Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja.
4. “Juara I Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Tingkat Nasional” atas nama “Kelompok Bangban Nusantara” Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok.
5. “Juara I Tingkat Nasional” Kategori Kelompok Masyarakat Pengawas atas nama “Kelompok Genteng Nusantara” Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap.
6. “E-KKP3k Award” Kategori Percontohan Efektifistas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perarian Pesisir dan Pulau Pualu Kecil Tingkat Nasional.
7. “Juara I Tingkat Nasional Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)” kategori KKMB Perikanan Tangkap.
8. “Juara Harapan II Tingkat Nasional Budidaya Rumput Laut” atas nama Kelompok Citra Indah Kecamatan Simpenan
9. “Juara I Tingkat Nasional Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan” Kategori P2MKP Berkinerja Terbbaik “P2MKP DejeeFish Kecamatan Cisaat
10. “Juara I Tingkat Propinsi” Kategori Pembudidaya Ikan Hias “Kelompok Mizumi Kecamatan Cisaat.
11. “Juara I Tingkat Nasional” Kategori Kelompok Masyarakat Pengawas atas nama “Kelompok Tegalbuleud Nusantara” Kecamatan Tegalbuleud Tahun 2014.
12. “Juara II Tingkat Nasional” Kategori Pembudidaya Ikan Hias “Kelompok Mizumi” Kecamatan Cisaat Tahun 2014.
13. “Satuan Kerja Terbaik III” Pada Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 Satuan Kerja Tugas Pembantuan Lingkup Dirjen KP3K Tahun 2014.
14. “Juara III Tingkat Nasional” Kategori Nelayan Teladan atas nama Eko Mulya (KUB Sumber Kuat) Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2014
15. Sebagai Partisipan dalam mensukseskan kampanye Gemarikan (Gemar Makan Ikan) Kategori Perorangan tingkat Nasional atas nama Yudhi Winarsono Basuki (RIZKY FOOD) Kecamatan Nyalindung tahun 2015

16. “Juara I Tingkat Propinsi” Kategori Pokmaswas Percontohan dalam E-KP3K Award atas nama Pokmaswas Mandrajaya Nusantara Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Tahun 2015.
17. “Juara III Tingkat Propinsi” Kategori UKM Pengolahan Terbaik atas nama Imelda (Poklahsar Duo Mitra Raya) Kecamatan Cisaat Tahun 2015.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Untuk dapat menyelenggarakan seluruh jenis pelayanan minimal yang ditetapkan diperlukan adanya peraturan bupati sebagai pedoman pelaksanaannya, untuk itu perlu dibuat SK Bupati mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. Selain aspek legalitas diatas adanya dukungan anggaran yang memadai dan petugas yang memiliki kompetensi dibidangnya mutlak diperlukan. Secara umum hal-hal yang diperlukan dalam upaya pengembangan pelayanan adalah :

1. Peningkatan tingkat kompetensi dan pemahaman pejabat berwenang terhadap SPM dan peraturan kerja yang berkaitan dengannya
2. Sosialisasi KEP MEN No. 44/MEN/2004 tentang SPM Bidang Kelautan dan Perikanan terhadap aparat Pembina maupun masyarakat perikanan pada umumnya
3. Tersedianya pegawai struktural maupun fungsional yang memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan (pengawas mutu, Pengawas hama penyakit, pengawas budidaya,
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pencapaian SPM seperti Lab Mutu Hasil Perikanan, Lab Hama Penyakit Ikan, BBI, UPR
5. Identifikasi dan penetapan kawasan budidaya dan reservat
6. Identifikasi dan penetapan lokasi pemeriksaan (check point)
7. Pengalokasian tenaga penyuluh perikanan pada setiap wilayah kerja penyuluh perikanan
8. Informasi peluang usaha dan investasi bidang kelautan dan perikanan

Dalam upaya pencapaian visi dan misi, perlu terlebih dahulu dilakukan identifikasi potensi internal (kekuatan dan kelemahan) dan potensi eksternal (peluang dan tantangan) yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat capaian dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Adapun peluang dan tantangan sebagaimana dimaksud antara lain seperti disajikan dalam Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 7. Matriks Peluang dan Tantangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi

PELUANG	TANTANGAN
Masih terbukanya peluang pasar bagi produk perikanan tangkap dan budidaya baik di tingkat lokal, regional, nasional dan global.	Terbukanya persaingan pasar global, sehingga menuntut adanya peningkatan kualitas produksi yang memenuhi standar nasional maupun global.
Terbukanya peluang untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi pasar, kemitraan usaha dan lembaga permodalan.	Terbatasnya kemampuan armada penangkap ikan yang dimiliki nelayan untuk memanfaatkan potensi perikanan di Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Tersedianya teknologi tepat guna yang dapat diadopsi untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya.	Produktivitas kolam para pembudidaya ikan, masih rendah
Produk perikanan merupakan komoditas hayati yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif tinggi.	Produk perikanan produk yang cepat rusak, oleh karena itu perlu penanganan yang cepat, tepat dan higienis

**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI****3.1 Identifikasi Permasalahan**

Pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sukabumi dihadapkan pada berbagai masalah. Sumberdaya kelautan dan perikanan dalam satu dekade terakhir ini cenderung mengalami degradasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Beberapa faktor penyebabnya antara lain aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran di air laut maupun perairan daratan, penangkapan ikan dengan bahan peledak, alat tangkap yang dilarang, penangkapan ikan secara berlebihan, kerusakan terumbu karang dan hutan mangrove. Selain faktor yang disebabkan oleh manusia kekurangan tersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga turut berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas kelautan dan perikanan. Secara nasional armada perikanan tangkap masih menggunakan perahu tanpa motor, motor temple dan kapal perikanan berukuran 0.5 – 3 GT yang mempunyai hari layar yang singkat (one day fishing), daya jelajah terbatas, daya tampungnya juga terbatas. Begitu pula dengan teknologi budidaya dan pengolahan hasil perikanan, dimana tingkat kerusakan dan kehilangan mutu ikan masih cukup tinggi.

**3.1.1 Analisis Lingkungan Internal****a. Kekuatan**

- 1). Kabupaten Sukabumi memiliki sumber daya alam kelautan dan perikanan yang potensial, variatif dan prospektif untuk dikelola secara optimal sebagai salah satu modal dasar pembangunan Daerah.
- 2) Kabupaten Sukabumi merupakan pusat pengembangan perikanan tangkap di Jawa Barat.
- 3) Rencana Peningkatan status Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Palabuhanratu.
- 4) Tersedianya sumber daya manusia pengelola, yaitu aparat pembina, pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan.
- 5) Secara formal untuk melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kelautan dan perikanan, telah dibentuk Lembaga Perangkat Daerah tersendiri yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan.



b. Kelemahan

- 1) Masih terbatasnya kompetensi SDM perikanan dalam melaksanakan inovasi dan adaptasi terhadap penerapan teknologi budidaya dan penangkapan ikan yang berwawasan lingkungan.
- 2) Masih terbatasnya ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan SDA kelautan dan perikanan, yaitu baru mencapai sekitar 30 % dari potensi yang tersedia.
- 4) Masih terbatasnya akses nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar produk perikanan terhadap informasi pasar, kemitraan usaha dan lembaga permodalan.

3.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal

a) Peluang

1. Masih terbukanya peluang pasar bagi produk perikanan tangkap dan budidaya baik di tingkat lokal, regional, nasional dan global.
2. Terbukanya peluang untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi pasar, kemitraan usaha dan lembaga permodalan.
3. Tersedianya teknologi tepat guna yang dapat diadopsi untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya.
4. Produk perikanan merupakan komoditas hayati yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif tinggi.

b) Tantangan

- 1) Terbukanya persaingan pasar global, sehingga menuntut adanya peningkatan kualitas produksi yang memenuhi standar nasional maupun global.
- 2) Terbatasnya kemampuan armada penangkap ikan yang dimiliki nelayan untuk memanfaatkan potensi perikanan di Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE).
- 3) Produktivitas kolam para pembudidaya ikan, masih rendah

- 4) Produk perikanan produk yang cepat rusak, oleh karena itu perlu penanganan yang cepat, tepat dan higienis

### 3.1.3 Faktor Penentu Keberhasilan

Berkenaan dengan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, faktor penentu keberhasilan (*current succes factor*) yang berfungsi untuk lebih memfokuskan penyusunan perencanaan strategis, adalah sebagai berikut:

- a. Strategi S-O mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
- b. Strategi S-T menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan
- c. Strategi W-O mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
- d. Strategi W-T mengurangi kelemahan untuk mengurangi tantangan

Tabel 8. Analisis SWOT Identifikasi Potensi Internal dan Eksternal Pelayanan

S-O	S-T	W-O	W-T
Mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi Dinas dalam mengakses informasi pasar, kemitran usaha dan lembaga permodalan.	Mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi Dinas dalam menyikapi persaingan global dalam memasarkan produk perikanan.	Meningkatkan kompetensi SDM perikanan untuk mengakses informasi pasar, kemitraan usaha dan lembaga permodalan.	Meningkatkan kompetensi SDM perikanan agar dapat melaksanakan penanganan pasca panen secara tepat.
Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya.	Meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas para pembudidaya ikan	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang ada agar dapat mengadopsi TTG untuk meningkatkan produktivitas perikanan	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas para pembudi daya ikan.
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDA perikanan	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDA	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA perikanan agar dapat	Mengoptimalkan pemanfaatan SDA perikanan agar

memanfaatkan peluang pasar.	perikanan dengan memanfaatkan armada penangkapan yang dapat menjangkau ZEE.	memanfaatkan peluang pasar.	dapat bersaing di pasar global.
Mengoptimalkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk meningkatkan produk perikanan yang memiliki keunggulan komparatif	Mengoptimalkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk meningkatkan penanganan pasca panen produk perikanan.	Meningkatkan akses terhadap lembaga permodalan agar dapat meningkatkan produk perikanan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif tinggi.	Meningkatkan akses terhadap lembaga permodalan agar dapat menambah armada tangkap yang mampu menjangkau ZEE.

## 3.2 Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi

### 3.2.1 VISI

Memasuki periode pembangunan jangka menengah kepala daerah yang baru, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki visi pembangunan yang merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya. Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi. Selain itu, visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan (dalam hal ini pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021).

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik

ke depan ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”**

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yakni religius dan mandiri. Dari dua elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian masyarakat seperti yang tergambar pada gambar berikut.

Gambar .1 Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi



#### a. Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius

Pembangunan Kabupaten Sukabumi merupakan proses perubahan yang direncanakan dalam memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Proses perubahan tersebut mencakup sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, hingga budaya daerah.

Dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi, aspek yang penting untuk diperhatikan perkembangannya adalah kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah saja, akan tetapi juga menjangkau sisi rohani seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan).

Elemen visi pembangunan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius pada intinya adalah pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan perikehidupan yang religius, dan harmonis dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi yang bermartabat dan berdaya saing.

Sementara itu, religius juga mengandung wujud makna toleransi. Toleransi merupakan suatu sikap manusia sebagai umat beragama yang mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Sebab kita ketahui bahwa Kabupaten Sukabumi dengan mayoritas penduduk beragama Islam harus memiliki sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Sehingga makna toleransi dalam pembangunan dapat diartikan sebagai pembangunan yang menyentuh semua komponen masyarakat.

## **b. Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi**

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandanginya tepat demi mencapai tujuan hidup dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya kemandirian merupakan usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Dalam konteks peningkatan daya saing sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya optimal untuk meningkatkan

harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Pembangunan Kabupaten Sukabumi dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kemandirian sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup dengan memperluas kerjasama, baik nasional maupun internasional.

Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi akan menjadi cerminan utuh dan menyeluruh dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Hal ini dikarenakan visi pembangunan daerah memberi penekanan pada peningkatan kualitas dan daya saing sebagai modal dasar dalam membentuk kemandirian setiap individu masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Kemandirian masyarakat yang tercantum dalam visi dan misi Bupati Sukabumi, ditekankan dalam hal "pemberdayaan" (*empowerment*). Pada hakekatnya upaya-upaya pembangunan di masyarakat memfokuskan pada pemberdayaan dengan melakukan *power sharing* agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam stakeholders lainnya, dan untuk mengoptimalkannya dilakukan dengan *information sharing* agar pemahaman antara masyarakat dapat setara pula dengan stakeholders lain.

Pemberdayaan sendiri pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang

harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pemberdayaan dapat membuat masyarakat lebih mandiri baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itu pemberdayaan dapat membantu pencapaian ke empat misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu kemandirian ekonomi (misi 1), sumber daya manusia yang berdaya saing (misi 2), tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional (misi 3) dalam hal ini berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan optimalisasi pelayanan dasar (misi 4).

### 3.2.2 MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the choosen track*) bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholders* pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
- d. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan**

Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan berkualitas. Pembangunan melalui pengembangan perekonomian menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas perekonomian daerah akan menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Sukabumi. Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi dititikberatkan pada daya saing dalam pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah saat ini masih perlu adanya pembenahan baik dari segi besaran nilai ekonomi maupun pemerataan bagi masyarakat. Disamping itu, pengelolaan SDA secara maksimal dan bijaksana perlu dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan maka perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung dengan adanya penciptaan iklim usaha baik dan kompetitif serta pendampingan usaha bagi masyarakat agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi. Peningkatan sektor pariwisata juga bisa menjadi alternatif strategis dalam pengembangan UMKM utamanya masyarakat di area obyek wisata. Selain itu, wisatawan yang masuk akan menjadi salah satu investasi dalam peningkatan nilai tambah sektor tersebut.

Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya. Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat dituntut untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian kerakyatan yang memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat mengindikasikan rendahnya pemerataan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sukabumi. Sehingga perlu adanya perhatian khusus pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara merata, optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada keberlanjutan lingkungan hidup.



## **2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius**

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumber daya manusia. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di kawasan Asia memperlihatkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Kabupaten Sukabumi harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi berupa pengembangan pendidikan secara merata di Kabupaten Sukabumi baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di luar sekolah. Namun, sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia berakhlak mulia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan agama penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk karakter masyarakat Kabupaten Sukabumi yang selaras dengan perwujudan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi bersifat komprehensif yang telah mempertimbangkan baik aspek jasmani (sandang, pangan dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.

## **3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional**

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar *good governance*. Dalam

mewujudkan *Good Governance* diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu:

- 1) Tidak ada korupsi
- 2) Tidak ada pelanggaran hukum
- 3) Tata kelola keuangan yang baik
- 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik
- 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada *overlap*
- 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik
- 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif
- 8) Adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah, dan
- 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna

meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparaturn pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai “corong” pelayanan kepada masyarakat.

sehat atau kesehatan perlu diperhatikan pula kesejahteraan para medis agar memberi motivasi lebih dalam peningkatan pelayanan mutu hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Penyediaan infrastruktur yang handal dalam perencanaan wilayah dan kota dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pemerataan pembangunan, penghematan energi, pelestarian ekologi atau lingkungan, pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan performa, dan menyerap peran serta masyarakat dalam proses pembangunan secara maksimal. Secara harfiah, pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Membangun infrastruktur bertujuan mengembangkan kualitas, infrastruktur yang handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses terjangkau dan merata bagi semua. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan karena merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

#### **4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah**

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar dan hak bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi yang harus terpenuhi sebagai bagian dari kebutuhan primer. Untuk lebih meningkatkan pendidikan, diperlukan mutu dan jumlah tenaga kependidikan yang baik pula sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Hidup sehat merupakan salah satu hak dan kebutuhan dasar bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal harus ditunjang dengan prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis yang ada. Dengan tersedianya prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis yang mencukupi akan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, untuk lebih meningkatkan mutu hidup

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat**

#### **3.3.1 Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan**

##### **A. MISI**

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipinggungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah “ **Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.**”.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

## B. MISI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

## C. TUJUAN

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

### **3.3.2 Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Barat**

#### **A Visi dan Misi**

Jawa Barat adalah sebuah provinsi yang bisa menjanjikan kehidupan yang nyaman dan sejahtera untuk semua, jika pemerintah daerah dan masyarakatnya sepakat untuk secara optimal menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan, serta memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Kebersamaan adalah sebuah kata kunci, sedangkan kepemimpinan adalah jawaban terhadap setiap tantangan. Sementara tata kelola pemerintahan daerah yang baik adalah titik tolak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.



Dengan modal kebersamaan, kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diharapkan masyarakat akan lebih mampu memanfaatkan segala potensi dan peluang yang tersedia.

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat 2013-2018 adalah :

**“ Masyarakat Perikanan dan Kelautan Jawa Barat  
yang Maju dan Sejahtera ”**

Pernyataan visi tersebut, memiliki beberapa kata kunci yang menjadi unsur pendorong untuk meningkatkan kinerja organisasi serta menjadi pengikat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pembangunan perikanan dan kelautan.

**MAJU** berarti :

*Sikap dan kondisi masyarakat perikanan dan kelautan yang produktif, berdaya saing, dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak, dan adaptif terhadap dinamika perubahan, namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal, dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.*

**SEJAHTERA** berarti :

*Sikap dan kondisi masyarakat perikanan dan kelautan Jawa Barat yang secara lahir dan bathin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupannya*

Pernyataan visi tersebut mengandung pemaknaan bahwa dalam selama periode Tahun 2014 – 2018, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat akan berupaya untuk :

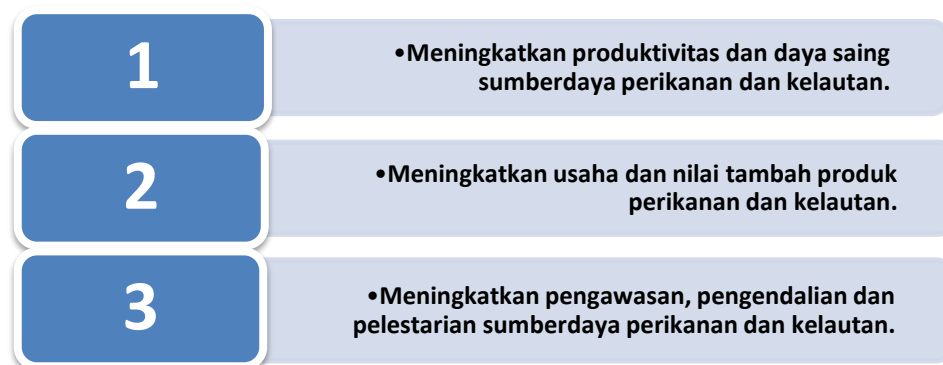
1. Mempercepat kualitas manajemen perikanan dan kelautan, sehingga dapat memberikan penguatan terhadap percepatan pembangunan ekonomi, fisik, sosial dan budaya di Jawa Barat.
2. Mengoptimalkan kinerja institusi dalam konteks pelayanan perikanan dan kelautan di Jawa Barat.

Untuk mewujudkan makna yang terkandung dalam visi sebagaimana telah disebutkan, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat akan memposisikan diri sebagai :

1. Inovator dalam pengembangan teknologi perikanan dan kelautan;
2. Motivator dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perikanan dan kelautan;
3. Fasilitator dalam pengembangan sarana dan prasarana untuk pengembangan aktivitas perikanan dan kelautan;
4. Mediator dalam penyediaan permodalan dan pengembangan usaha;
5. Dinamisator peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sekaligus mengantisipasi perubahan perkembangan situasi dan kondisi regional, nasional, lingkungan strategis serta kecenderungan global dengan perubahan yang begitu cepat.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki ditetapkan misi yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat, misi tersebut adalah sebagai berikut.

Gambar 2. Misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 2013-2018



### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011, kawasan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sukabumi diperuntukan untuk :

- a. Peruntukan Perikanan Budidaya Air Tawar;
- b. Peruntukan Perikanan Budidaya Laut;
- c. Peruntukan Perikanan Budidaya Air Payau;
- d. Peruntukan Perikanan Tangkap;



e. Peruntukan Minapolitan; Dan

f. Penyediaan Prasarana Perikanan.

a) Peruntukan perikanan budidaya air tawar terdiri dari :

1. Perikanan Budidaya Air Tawar Kolam Rakyat

Budidaya kolam rakyat terdiri dari ikan konsumsi dan ikan hias. Jenis ikan konsumsi antara lain nila, mas, lele, gurame, tawes, patin, sepat, nilem dan tambakan dengan daerah penyebaran meliputi ; Kecamatan Cisaat, Kecamatan Caringin, Kecamatan Kadudampit, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Kebonpedes, Kecamatan Parakansalak, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Parungkuda, Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Cikembar, Kecamatan Cireunghas, Kecamatan Palabuhanratu, Kecamatan Cikakak, Kecamatan Cisolok, Kecamatan Simpenan, Kecamatan Jampangkulon dan Kecamatan Surade. Jenis ikan hias yang dibudidayakan di kolam rakyat antara lain koi, metaik, baster, komet, sodager, manvis, koki, gupi dan barbir. Sebaran lokasi budidaya ikan hias meliputi : Kecamatan Cisaat, Caringin, Kadudampit, Cibadak, Cicurug, Cidahu dan Sukabumi.

2. Perikanan Budidaya Sawah Mina Padi

Ikan yang dipelihara pada sawah mina padi adalah ikan mas dan nila. Sebaran lokasi mina padi meliputi kecamatan : Cisaat, Cibadak, Sukaraja, Sukabumi, Cireunghas, Parungkuda, Cicurug, Cidahu, Parakansalak, Bojonggenteng, Jampangkulon, Surade dan Cisolok.

3. Perikanan Budidaya Pembenihan

Selain usaha pembenihan rakyat terdapat juga sentra pembenihan Balai Benih Ikan yang terdiri dari BBI Air Tawar, BBI Laut dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR). Jenis ikan yang dikembangkan di BBI Air Tawar meliputi ikan mas, nila, lele, dan patin. BBI Air Tawar terdapat di Kecamatan Cisolok (BBI Cimaja), Kecamatan Sukalarang (BBI Cigadog) dan Kecamatan Baros Kota Sukabumi (BBI Lembursitu). BBI Air Laut akan dikembangkan di daerah Kecamatan Cisolok dan Simpenan dengan jenis ikan meliputi ikan kerapu, beronang, cobia, dan udang/lobster. UPR pembenihan tersebar di Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Caringin, Kadudampit dan Kebonpedes. Jenis ikan yang dikembangkan di UPR adalah ikan mas, nila dan lele.

b) Peruntukan Perikanan Budidaya Air Laut terdiri dari budidaya ikan dan rumput laut.

Untuk budidaya ikan laut akan dikembangkan jenis ikan kerapu, beronang, cobia dan udang/lobster dengan sebaran lokasi meliputi Kecamatan Simpenan, Cisolok, Palabuhanratu, Cikakak, Simpenan, Ciracap, Surade dan Tegalbuleud. Sedangkan budidaya rumput laut tersebar di Cisolok, Simpenan, Ciemas.

c) Peruntukan Perikanan Budidaya Air Payau terdiri dari jenis kepiting dan udang-udangan.

Sebaran lokasi di Kecamatan Cibitung, Ciemas dan Surade.

d) Peruntukan Perikanan Tangkap terdiri dari penangkapan di laut dan perairan umum seperti situ, waduk dan sungai.

Untuk perikanan tangkap meliputi 9 Kecamatan pesisir (Palabuhanratu, Simpenan, Cisolok, Cikakak, Ciemas, Cibitung, Ciracap, Surade dan Tegalbuleud) dengan panjang garis pantai 117 Km dan fishing ground seluas 702 Km<sup>2</sup>. Zona tangkap dan zona perikanan tangkap laut meliputi:

1. Zona Tangkap :
  - a) Zona I-A sejauh 3 (tiga) mil dari garis pantai; dan
  - b) Zona I-B sejauh 6 (enam) mil dari garis pantai.
2. Zona Perikanan meliputi:
  - a) Zona II sejauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan
  - b) Zona III sejauh 200 (dua ratus) mil dari garis pantai.

Perikanan tangkap di perairan umum meliputi jenis ikan mujair, nila, mas, tawes, nilem, tambakan, sepat dan udang tawar.

e) Peruntukan Minapolitan terdiri dari kawasan inti dan kawasan penyangga.

Kawasan inti terletak di Kecamatan Palabuhanratu dengan kawasan penyangga terdiri dari 9 Kecamatan Pesisir dan Kecamatan Bantargadung.

f) Peruntukan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelautan Perikanan terdiri dari TPI/PPI yang terdiri dari :

1. TPI/PPI Palabuhanratu
2. TPI/PPI Cisolok
3. TPI/PPI Cibangban
4. TPI/PPI Ciwaru
5. TPI/PPI Ujunggenteng
6. TPI/PPi Minajaya

Undang-undang No. 9 tahun 2005 tentang Perikanan mengatur mengenai wilayah perikanan yang mencakup perairan Indoneia yaitu : sungai, waduk, rawa,

ZEE dan genangan air lainnya. Di dalam wilayah perairan tersebut pemerintah melaksanakan pengelolaan Sumberdaya Ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumberdaya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya ditujukan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan. Pada prinsipnya kegiatan budidaya dapat dilaksanakan ditempat-tempat dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Bukan kawasan lindung
2. Bukan kawasan wisata
3. Terdapat sumber air dengan kuantitas dan kualitas yang memadai

Secara kualitas perairan pantai wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi sangat sesuai untuk pertumbuhan rumput laut, karena memiliki tingkat kecerahan yang tinggi sehingga penetrasi cahaya matahari untuk kebutuhan fotosintesa rumput laut ke dalam air cukup tersedia. Untuk perikanan air tawar lebih dominan terdapat di wilayah Utara, karena kesesuaian lahan budidaya dan kuantitas air lebih yang lebih baik. Selain memiliki potensi pembangunan yang tinggi, wilayah pesisir juga sangat rentan terhadap berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan baik yang berlangsung didalam wilayah pesisir maupun yang berada di laut lepas. Dalam skala tertentu suatu pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem pesisir itu sendiri yang menurunkan mutu lingkungan dan selanjutnya dapat menjadi kerusakan ekosistem wilayah pesisir. Permasalahan budidaya ikan antara lain :

1. Teknologi yang diterapkan masih sederhana
2. Pola tanam tidak teratur dan sepenuhnya masih mengandalkan benih dari alam sehingga sulit mengontrol hama dan penyakit
3. Jaringan irigasi tambak pada umumnya tidak berfungsi dengan baik sehingga pasokan air untuk tambak terganggu.
4. Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir akibat faktor alam (abrasi dan banjir), perilaku manusia (penambangan liar pasir besi, penjarahan hutan dan penggunaan bahan peledak)
5. Terjadinya pencemaran (limbah aktivitas pelabuhan dan limbah domestic)
6. Belum adanya Perda Tata Ruang dan Wilayah serta Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

Air merupakan media utama dalam kegiatan budidaya ikan, karenanya pengelolaan terhadap sumber-sumber air alami maupun buatan harus menjadi prioritas utama. Pengendalian pengaruh lingkungan yang masuk ke areal budidaya melalui media air perlu diperhatikan. Volume air yang masuk melalui aliran sungai sangat menentukan kualitas air budidaya. Proses sedimentasi dimulut saluran sungai atau kanal-kanal air akan menghambat masuknya aliran air. Kegiatan pemupukan dan penggunaan obat pemberantas hama di daerah pertanian melalui proses pencucian juga akan masuk dan mencemari air budidaya, karenanya perlu pengendalian penggunaan obat-obatan tersebut di wilayah pertanian. Pengendalian terhadap aliran input air kedalam areal budidaya dapat dilakukan dengan penyediaan saluran irigasi khusus sehingga sisa-sisa bahan beracun dari aktifitas pertanian di daerah hulu tidak masuk dan mencemari perairan. Pengaruh abrasi bisa diperkecil dengan menyediakan suatu zona penyangga antara garis pantai dengan areal pertambakan misalnya berupa hutan mangrove.

Menurut lokasi kegiatannya, perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi dapat dikelompokkan dalam kelompok perikanan lepas pantai (*off shore fisheries*) dan perikanan pantai (*Coastal fisheries*). Perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi didominasi oleh perikanan pantai. Masalah utama dalam perikanan tangkap adalah :

1. Eksploitasi ikan berlebihan(*over fishing*)
2. Pencurian ikan
3. Penurunan Sumber Daya Ikan (SDI) akibat adanya budaya penangkapan impun dan pengoperasian bagan serta alat tangkap yang tidak ramah lingkungan
4. Degradasi kualitas lingkungan fisik dan biologis

Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan upaya konservasi baik terhadap sumberdaya ikan maupun lingkungan pendukungnya seperti terumbu karang dan mangrove.

Tabel 9  
Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi berdasarkan Analisis KLHS beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KHLS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung	Berkurangnya wilayah/kawasaan perikanan	Belum tartatanya rencana tata ruang di wilayah2	Tehnologi terapan terus berkembang

	lingkungan hidup untuk pembangunan	karena alih fungsi menjadi pemukiman	potensi perikanan dan kelautan	sesuai potensi yang ada
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Ketidak seimbangan penyediaan bahan pangan dengan penambahan penduduk	Berkurangnya lahan lahan produktif yang dijadikan pemukiman	Berkembangnya teknologi intensifikasi dalam meningkatkan produktivitas lahan
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Belum adanya peraturan dan perundang undangan yang jelas dalam alih fungsi lahan	Kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah	Kesadaran semua pihak dalam mengontrol resiko jasa ekosistem
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Program intensifikasi memerlukan dana yang cukup besar dan teknologi tinggi	Perlu dukungan permodalan yang cukup tinggi dalam peningkatan intensifikasi suatu usaha	Program program peningkatan usaha sudah dikururkan. KUR, KKP-E dan lain ,lain
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Resiko pada usaha intensifikasi Perikanan cenderung meningkat	Terjadi kegagalan usaha akibat perubahan iklim yang ekstrim	Berkembangannya benih benih unggul
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Ketersediaan teknologi diversifikasi usaha pada lahan lahan yang ada serbatas	Berkurangnya lahan produktif untuk usaha penyediaan bahan ketahanan pangan	Disversifikasi pangan non beras

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi atau diperkirakan akan terjadi dan memiliki urgensi untuk dipecahkan, dimana jika tidak dipecahkan akan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, penanganan permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan secara bertahap.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas Pokok dan Fungsi antara lain seperti dalam Tabel 10 dibawah ini :

Tabel 10. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Aspek kajian	Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Kepegawaian	Masih kurangnya pegawai dengan latar belakang/ kompetensi yang sesuai dengan bidang kelautan perikanan	Jumlah pegawai dengan latar belakang kelautan perikanan	Kurangnya pendidikan/pelatihan kompetensi bagi aparatur	Terbatasnya dana	Terbatasnya jumlah personil di daerah

Produksi kelautan dan perikanan	Produksi perikanan tangkap menurun	Data statistik kelautan dan perikanan	Kurangnya sosialisasi tentang alat tangkap yang ramah lingkungan	Budaya "salawean" penangkapan impugn tiap tanggal 25 bulan komariah	Terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan
			Alat tangkap yang digunakan masih tradisional dengan teknologi yang terbatas		
	Produksi perikanan budidaya menurun	Data statistik kelautan dan perikanan	Teknologi budidaya masih relative sederhana	Berkurangnya areal budidaya	
				Menurunnya kuantitas dan kualitas air budidaya	
Pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Adanya eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan		Kurangnya pengawasan dan sosialisasi kepada aparaturnya dan masyarakat	Masih adanya pencurian telur penyu	Belum tersedianya perangkat hukum yang berkaitan dengan regulasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
			Lemahnya penegakan hukum	Adanya ancaman penyerobotan lahan oleh masyarakat	
	Belum adanya Perda mengenai pemanfaatan wilayah pesisir serta Pewilayahan pengembangan kelautan dan perikanan belum terkoordinasi dengan baik		Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait	Belum terimplementasikannya RTRW dan payung hukum tentang pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir	
Mutu produk kelautan dan perikanan	Tingkat kerusakan hasil kelautan dan perikanan masih cukup tinggi dengan mutu yang rendah		Belum diterapkannya sistem rantai dingin di atas kapal, kolam, tambak, TPI, tempat penampungan dan tempat pengolahan		
Konsumsi ikan	Tingkat konsumsi		Masih	Gaya hidup	Masih

perkapita	ikan perkapita masih rendah		rendahnya sosialisasi gemar makan ikan bagi masyarakat	masyarakat yang konsumtif sehingga lebih memilih menjual ikan untuk hal yang bersifat konsumtif daripada dikonsumsi sendiri	terbatasnya data/sumber data dari lokasi
			Masih kurangnya diversifikasi produk kelautan dan perikanan		

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Armada Penangkapan Didominasi Kapal 5 GT
2. Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan Masih Beroperasi
3. Tertangkapnya Ikan Yang Tidak Layak Konsumsi
4. Penerapan Teknologi Penangkapan Masih Rendah
5. Waktu Operasi Penangkapan Semakin Lama Dan Jauh
6. Penurunan Kualitas Lingkungan Pesisir Dan Laut
7. Penegakan Hukum Lemah
8. Belum Harmonisnya Pemanfaatan Kawasan Pesisir Dan Laut
9. Penerapan Teknologi Budidaya Masih Rendah
10. Kepemilikan Lahan Budi Daya Yang Sempit
11. Pemanfaatan Lahan Budidaya Belum Optimal
12. Belum Ada Penataan Ruang Pemanfaatan Budidaya
13. Belum Terpetakan Komoditas Tiap Kawasan
14. Harga Pakan Yang Mahal ( 60% Biaya Operasional)
15. Pelaksanaan Sistem Rantai Dingin Belum Optimal
16. Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Masih Tradisional
17. Belum Tersertifikasinya Pengolah Hasil Perikanan
18. Kualitas Kemasan Belum Menarik
19. Rendahnya Pemanfaatan Produk Perikanan Non Konsumsi
20. Akses Modal Sektor Kelautan Dan Perikanan Rendah
21. Uu 23 Tahun 2014 Mengenai Kewenangan Pusat Dan Daerah

**BAB IV**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 – 2021**

**4.1 Visi dan Misi**

Memasuki periode pembangunan jangka menengah kepala daerah yang baru, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki visi pembangunan yang merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya. Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi. Selain itu, visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan (dalam hal ini pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021).

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

VISI :

**“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”**

MISI :

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.



Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi selama periode pembangunan 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian
2. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan
3. Meningkatkan kesempatan dan produktivitas Kerja serta perluasan kesempatan usaha
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal
7. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan peningkatan nilai ekspor
8. Meningkatkan kapasitas lembaga dan kemandirian usaha ekonomi mikro perdesaan
9. Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal
10. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
11. Meningkatkan pembinaan dan prestasi olahraga
12. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan
13. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
14. Meningkatkan penanganan dan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Melestarikan Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.
15. Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
16. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan
17. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional
18. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

19. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
20. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi pertanahan
21. Membangun budaya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
22. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat perdesaan
23. Mengentaskan desa sangat tertinggal dan tertinggal
24. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten sukabumi yang mendukung e-government
25. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
26. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas
27. Meningkatkan budaya baca masyarakat
28. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang religius, mandiri dan berdaya saing
29. mewujudkan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan
30. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal
31. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian
32. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktifitas ekonomi dan pelayanan dasar
33. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
34. Meningkatkan Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam

Misi yang Menjadi Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi yang berkaitan dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah **meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan dengan arah tujuan pembangunan Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan**, dengan sasaran jangka Menengah dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi adalah:

1. Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan

2. Terwujudnya sentra perikanan budidaya air tawar, dan pengolahan hasil perikanan

Dalam melihat keterkaitan dan hierarki visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunannya kelautan dan perikanan Kabupaten Sukabumi periode pembangunan 2016-2021 disajikan pada tabel berikut Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD dijelaskan dalam Tabel 11 berikut ini

Tabel 11. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi

No	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator Tujuan	Eksistensi 2015	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri</b>												
<b>MISI 1: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan</b>												
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menstimulasi usaha mikro dan menengah	Presentase pertumbuhan PDRB	10%	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan	Prosentase peningkatan pendapatan pengolahan ikan	6,49%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
					Prosentase Peningkatan pendapatan nelayan	3,67%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
					Prosentase Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan	9,92%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
				Terwujudnya sentra perikanan budidaya	Cluster Budidaya	5	5	6	6	7	8	9

#### 4.3 Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Untuk Mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan

Strategi untuk mencapai sasaran adalah dengan melaksanakan Program:

1. Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan
2. Pengembangan Perikanan tangkap
3. Pengembangan Perikanan budidaya

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

1. Penumbuhan Wirausahawan baru disektor perikanan
2. Peningkatan Kuantitas armada dan alat tangkap yang ramah lingkungan
3. Peningkatan Produksi dan sertifikasi pembenihan, pembudidaya ikan
4. Peningkatan jenis dan unit pengolahan serta sertifikasi pengolahan hasil perikanan.
5. Fasilitasi pemasaran dan kemitraan produk perikanan.
6. Pembangunan sarana dan prasarana perikanan.
7. Penetapan kawasan perikanan melalui peraturan bupati.
8. Diseminasi teknologi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan.
9. Perlindungan untuk Pelaku Usaha Perikanan

Tabel 12. Tujuan, dan sasaran, strategi dan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program	Kebijakan
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menstimulasi usaha mikro dan menengah	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan	1) Mendorong produksi perikanan; 2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelaku Usaha Perikanan; 3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan	Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan	1. Mengembangkan nilai produksi perikanan; 2. Sertifikasi Produk Perikanan; 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan; 4. Diseminasi Teknologi Usaha Perikanan; 5. Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan 6. Penetapan kawasan melalui peraturan Bupati
			Pengembangan Perikanan tangkap	
			Pengembangan Perikanan Budidaya	

## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2016 – 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi melaksanakan 3 program unggulan yaitu :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan
2. Program Pengembangan Perikanan tangkap
3. Program pengembangan Perikanan Budidaya

Selain Program-program unggulan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan program rutin yang setiap tahun dilaksanakan, yaitu :

Program Kegiatan Rutin:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif selama tahun 2016 – 2021 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 13.Matriks Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021

Program	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja														SKPD Penanggungjawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan	Jumlah Pengolah hasil perikanan	Jumlah Pengolah dan pemasar hasil perikanan dihitung berdasarkan aktifitas pengolah atau pemasar yang masih aktif	Orang	3.028	1.556	200	1.566	200	1.574	250	1.727	250	1.813	300	1.903	300	1.903	1.500	DISLUTKAN
	Produksi hasil olahan perikanan	Penghitungan jenis dan jumlah produksi di setiap unit pengolahan ikan	Ton	16	14.484	300	15.081	300	15.084	400	16.627	450	17.458	500	18.331	500	18.331	2.500	DISLUTKAN
Pengembangan Perikanan tangkap	Jumlah Nelayan	Jumlah Nelayan dihitung berdasarkan kepemilikan kartu nelayan yang masih aktif	Orang	9.842	9.252	200	9.033	200	9.214	200	9.398	200	10.457	200	10.980	200	10.980	1.200	DISLUTKAN
	Produksi Perikanan Tangkap	Penghitungan jenis dan jumlah tangkapan di setiap TPI	Ton	14	10.241	750	10.318	900	10.120	1.050	10.322	1.200	11.944	1.350	12.541	1.500	12.541	6.750	DISLUTKAN
pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya dihitung berdasarkan seluruh tenaga kerja yang melakukan aktifitas pembenihan dan pembesaran ikan	Orang	27.781	29.532	200	29.602	200	27.841	200	32.636	250	34.268	250	35.981	300	35.981	1.400	DISLUTKAN
	Produksi ikan konsumsi	Penghitungan jenis dan jumlah produksi di setiap pembudidaya ikan	Ton	29,551.40	33.897	606	33.857.057	763	34.534	951	37.327	1.100	39.193.776	1.435	41.153.464	1.500	41.153.464	6.355	DISLUTKAN
	Produksi benih ikan konsumsi	Penghitungan jenis dan jumlah produksi di setiap pembenihan dan BBI	Ekor	3,700,777,850	4.083.401	250	4.102.956	300	4.185.015	300	4.523.508.990	400	4.749.685	600	4.987.169	700	4.987.169	2.550	DISLUTKAN

Program	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja														SKPD Penanggungjawab
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Produksi ikan hias	Penghitungan jenis dan jumlah produksi di setiap pembudidaya ikan hias dan BBI	Ekor	93.869.700	101.124.700	50	104.836.732	70	106.933.467	80	115.582.000	90	121.361.621	100	127.429.702	150	127.429.702	540	DISLUTKAN
	Jumlah Cluster Budidaya	Lokasi yang ditetapkan sebagai Cluster telah melalui tahapan indentifikasi, sosialisasi dan kesepakatan dengan pelaku usaha dan ditetapkan dengan SK Bupati	Lokasi	5	5	500	6	500	6	500	7	500	8	500	9	500	9	3.000	DISLUTKAN

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021, Beberapa Indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi melalui beberapa Program Proritas. indikator tersebut merupakan indicator program dan sasaran kegiatan yang harus di capai.

Tabel 14. Indikator Kinerja dan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
1	Prosentase peningkatan pendapatan pengolah ikan	%	6,49%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2	Prosentase Peningkatan pendapatan nelayan	%	3,67%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3	Prosentase Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan	%	9,92%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4	Terwujudnya sentra perikanan budidaya	Kec	5	5	6	6	7	8	9	9

#### Tahun 2016

1. pengolah hasil perikanan tahun 2015 adalah Rp. 2.114.698,-, jadi peningkatan pendapatan pengolah hasil perikanan sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun tahun 2016 adalah Rp. 231.302 sehingga pendapatan total pengolah hasil perikanan yang harus dicapai adalah Rp. 2.346.000,-.



2. Pendapatan nelayan tahun 2015 adalah Rp. 2.420.230,-, Target Peningkatan Pendapatan Nelayan sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun 2016 tidak tercapai di karenakan beberapa faktor sehingga pendapatan total nelayan yang dicapai Pada Tahun 2016 adalah Rp. 1.771.300,-.
3. Pendapatan pembudidaya ikan tahun 2015 adalah Rp. 2.846.750,-, jadi peningkatan pendapatan pembudidaya ikan sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun tahun 2016 adalah Rp. 261.410,- sehingga pendapatan total pembudidaya ikan yang harus dicapai adalah Rp 3.108.160,-

### **Tahun 2017**

1. pengolah hasil perikanan tahun 2016 adalah Rp 2.346.000,-, jadi peningkatan pendapatan pengolah hasil perikanan sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun tahun 2017 adalah Rp 256.649 sehingga pendapatan total pengolah hasil perikanan yang harus dicapai adalah Rp 2.602.649,-.
2. Pendapatan nelayan tahun 2016 adalah Rp. Rp 1.771.300,-, jadi peningkatan pendapatan nelayan sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun tahun 2017 adalah Rp 222.878,- sehingga pendapatan total nelayan yang harus dicapai adalah Rp1.994.178,-.
3. Pendapatan pembudidaya ikan tahun 2016 adalah Rp 3.108.160,-, jadi peningkatan pendapatan pembudidaya ikan sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun tahun 2017 adalah Rp 221.321,- sehingga pendapatan total pembudidaya ikan yang harus dicapai adalah Rp. Rp 3.329.481,-

### **Tahun 2018**

1. pengolah hasil perikanan tahun 2017 adalah Rp 2.602.649,-, jadi peningkatan pendapatan pengolah hasil perikanan sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun tahun 2018 adalah Rp 260.265 sehingga pendapatan total pengolah hasil perikanan yang harus dicapai adalah Rp 2.862.914,-.
2. Pendapatan nelayan tahun 2017 adalah Rp 1.994.178,-, jadi peningkatan pendapatan nelayan sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun tahun 2018 adalah Rp 199.418,- sehingga pendapatan total nelayan yang harus dicapai adalah Rp 2.193.596,-.
3. Pendapatan pembudidaya ikan tahun 2017 adalah Rp 3.329.481,-, jadi peningkatan pendapatan pembudidaya ikan sebesar 10% yang harus dicapai

pada tahun tahun 2018 adalah Rp 332.948,- sehingga pendapatan total pembudidaya ikan yang harus dicapai adalah Rp 3.662.429,-

### **Tahun 2019**

1. pengolah hasil perikanan tahun 2018 adalah Rp 2.862.914,-, jadi peningkatan pendapatan pengolah hasil perikanan sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun tahun 2019 adalah Rp 286.291 sehingga pendapatan total pengolah hasil perikanan yang harus dicapai adalah Rp 3.149.205,-.
2. Pendapatan nelayan tahun 2018 adalah Rp 2.193.596,-, jadi peningkatan pendapatan nelayan sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun tahun 2019 adalah Rp 219.360,- sehingga pendapatan total nelayan yang harus dicapai adalah Rp 2.412.956,-.
3. Pendapatan pembudidaya ikan tahun 2018 adalah Rp 3.662.429,-, jadi peningkatan pendapatan pembudidaya ikan sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun tahun 2019 adalah Rp 366.243,- sehingga pendapatan total pembudidaya ikan yang harus dicapai adalah Rp 4.028.672,-

### **Tahun 2020**

1. pengolah hasil perikanan tahun 2019 adalah Rp 3.149.205,-, jadi peningkatan pendapatan pengolah hasil perikanan sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun tahun 2020 adalah Rp 314.92,-. sehingga pendapatan total pengolah hasil perikanan yang harus dicapai adalah Rp 3.464.126,-.
2. Pendapatan nelayan tahun 2019 adalah Rp 2.412.956,-, jadi peningkatan pendapatan nelayan sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun tahun 2020 adalah Rp 241.296,- sehingga pendapatan total nelayan yang harus dicapai adalah Rp 2.654.251,-.
3. Pendapatan pembudidaya ikan tahun 2019 adalah Rp 4.028.672,-, jadi peningkatan pendapatan pembudidaya ikan sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun tahun 2020 adalah Rp 402.867,- sehingga pendapatan total pembudidaya ikan yang harus dicapai adalah Rp 4.431.539,-

### **Tahun 2021**

1. pengolah hasil perikanan tahun 2020 adalah Rp 3.464.126,-, jadi peningkatan pendapatan pengolah hasil perikanan sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun tahun 2021 adalah Rp 346.413 sehingga pendapatan total pengolah hasil perikanan yang harus dicapai adalah Rp 3.810.539,-.

2. Pendapatan nelayan tahun 2020 adalah Rp 2.654.251,-, jadi peningkatan pendapatan nelayan sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun tahun 2021 adalah Rp 265.425,- sehingga pendapatan total nelayan yang harus dicapai adalah Rp 2.919.676,
3. Pendapatan pembudidaya ikan tahun 2020 adalah Rp 4.431.539,-, jadi peningkatan pendapatan pembudidaya ikan sebesar 10% yang harus dicapai pada tahun tahun 2021 adalah Rp 443.154,- sehingga pendapatan total pembudidaya ikan yang harus dicapai adalah Rp 4.874.693,-

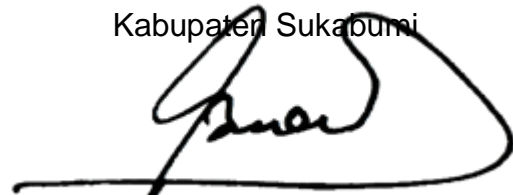
## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi selain merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi, juga merupakan rujukan dalam implementasi tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu enam tahun ke depan. Selain itu juga dijadikan sebagai instrument evaluasi untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan rencana kerja yang disusun dan ditetapkan pada setiap tahun anggaran.

Dalam proses pelaksanaannya, berbagai faktor internal maupun eksternal akan sangat berpengaruh. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya pemahaman dan komitmen serta kerjasama sinergis dari seluruh stakeholders bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Sukabumi khususnya dan seluruh stakeholders pada umumnya.

Kepala Dinas Dinas Kelautan dan  
Perikanan  
Kabupaten Sukabumi



**Ir. H. DADANG BUDIMAN, MM**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 196305031988031008

# LAMPIRAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Tahun -6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	(1 juta)	target	(1 juta)	target	(1 juta)	target	(1 juta)	target	(1 juta)	target	(1 juta)	target	(1 juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Terpenuhinya kebutuhan operasional Aparatur																	
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Alat Tulis kantor	25 macam	25 macam	45	25 macam	45	25 macam	45	25 macam	45	25 macam	45	25 macam	45	25 macam	45		
					Alat Listrik dan Elektronik	5 macam	5 macam	15	5 macam	15	5 macam	15	5 macam	15	5 macam	15	5 macam	15	5 macam	15		
					Materai	400 Buah	400 Buah	2	400 Buah	2	400 Buah	2	400 Buah	2	400 Buah	2	400 Buah	2	400 Buah	2		
					Alat Kebersihan	16 macam	16 macam	10	16 macam	10	16 macam	10	16 macam	10	16 macam	10	16 macam	10	16 macam	10		
					Jasa komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik Untuk Pemakaian:																	
					- Telepon	12 bulan/3 saluran	12 bulan/3 saluran	15	12 bulan/3 saluran	15	12 bulan/3 saluran	15	12 bulan/3 saluran	15	12 bulan/3 saluran	15	12 bulan/3 saluran	15	12 bulan/3 saluran	15		
					- Air	12 Bulan/3 Lokasi	12 Bulan/3 Lokasi	25	12 Bulan/3 Lokasi	25	12 Bulan/3 Lokasi	25	12 Bulan/3 Lokasi	25	12 Bulan/3 Lokasi	25	12 Bulan/3 Lokasi	25	12 Bulan/3 Lokasi	25		
					- Listrik	12 Bulan/6 Lokasi	12 Bulan/6 Lokasi	120	12 Bulan/6 Lokasi	120	12 Bulan/6 Lokasi	120	12 Bulan/6 Lokasi	120	12 Bulan/6 Lokasi	120	12 Bulan/6 Lokasi	120	12 Bulan/6 Lokasi	120		
					- Internet (Speedy)	12 Bulan	12 Bulan	15	12 Bulan	15	12 Bulan	15	12 Bulan	15	12 Bulan	15	12 Bulan	15	12 Bulan	15		
					Koran dan Majalah	4 eksemplar/1 eks	4 eksemplar	5	4 eksemplar	5	4 eksemplar	5	4 eksemplar	5	4 eksemplar	5	4 eksemplar	5	4 eksemplar	5		
					Barang Cetak	11 macam	11 macam	15	11 macam	15	11 macam	15	11 macam	15	11 macam	15	11 macam	15	11 macam	15		
					Penggandaan	50.000 Lembar	50.000 Lembar	8	50.000 Lembar	8	50.000 Lembar	8	50.000 Lembar	8	50.000 Lembar	8	50.000 Lembar	8	50.000 Lembar	8		
					Fasilitas Pelayanan kantor dan Rapat	12 Bulan	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan	20	12 Bulan	20		
					Fasilitas : Rapat, Konsultansi, Koordinasi, Seminar,	12 Bulan	12 Bulan	50	12 Bulan	50	12 Bulan	50	12 Bulan	50	12 Bulan	50	12 Bulan	50	12 Bulan	50		
					Perjalanan Dinas	1 LS	1 LS	150	1 LS	150	1 LS	150	1 LS	150	1 LS	150	1 LS	150	1 LS	150		
					Pemeliharaan jaringan Internet, Listrik, dan Air	5 kali	5 kali	15	5 kali	15	5 kali	15	5 kali	15	5 kali	15	5 kali	15	5 kali	15		
					Tenaga Harian Lepas	7 orang	7 orang	92,4	7 orang	92,4	7 orang	92,4	7 orang	92,4	7 orang	92,4	7 orang	92,4	7 orang	92,4		
	Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		Pelayanan Administrasi Aset	Data Aset				1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50	1 Dokumen	50		

				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>																
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan peningkatan sarana prasarana		Pembangunan Gedung Arsip (Lanjutan)	Gedung Arsip					80 m²	200						80 m²	200		
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan peningkatan sarana prasarana		Pembuatan Kanopi	Kanopi					1 Paket	200						1 Paket	200		
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan peningkatan sarana prasarana		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor	5 gedung	45	5 gedung	70	5 gedung	200	5 gedung	150	5 gedung	100	5 gedung	50	5 gedung	615	
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan peningkatan sarana prasarana		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	41 Unit	250	41 Unit	275	41 Unit	350	41 Unit	300	41 Unit	300	41 Unit	350	41 Unit	1825	
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan peningkatan sarana prasarana		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor (Tabung Pemadam Kebakaran, AC,	91 Unit	45	91 Unit	60	91 Unit	100	91 Unit	100	91 Unit	100	91 Unit	100	91 Unit	505	
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan peningkatan sarana prasarana		Penataan Halaman Kantor	Halaman kantor					1326 m²	300						1326 m²	300		
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan peningkatan sarana prasarana		Pengadaan Mebeulair	Meubelair					1 Paket	50						1 Paket	50		
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan peningkatan sarana prasarana		Pengadaan Peralatan Komputer	Laptop dan Printer					1 Paket	50						1 Paket	50		
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan peningkatan sarana prasarana		Rehabilitasi Gedung Kantor	Perbaikan Atap dan lantai					2 Unit	500						2 Unit	500		
				<b>Program peningkatan Disiplin Aparatur</b>																
	Meningkatnya disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur		Pengadaan pakaian Hari-hari tertentu	Meningkatnya Disiplin Aparatur	54 orang	45	54 orang	45	54 orang	45	54 orang	45	54 orang	45	54 orang	45	54 orang	270	
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																
	Meningkatnya birokrasi yang profesional dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		Bimbingan teknis Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SD Aparatur	50 orang	50	50 orang	50	50 orang	50	50 orang	50	50 orang	50	50 orang	50	50 orang	300	
				<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Cakupan pengelolaan laporan SKPD		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya laporan Capaian Kinerja	5 Dokumen	100	5 Dokumen	100	5 Dokumen	100	5 Dokumen	100	5 Dokumen	100	5 Dokumen	100	5 Dokumen	600	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Akuntabel	Cakupan pengelolaan laporan SKPD		Penyusunan Laporan Keuangan	Meningkatnya laporan Keuangan	3 Dokumen	100	3 Dokumen	100	3 Dokumen	100	3 Dokumen	100	3 Dokumen	100	3 Dokumen	100	3 Dokumen	600	

Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku perikanan	jumlah pendapatan nelayan, pembudidaya, pengolahan/pemasar ikan meningkat																					
				Peningkatan mutu produk perikanan	Pelatihan Manajemen Mutu Terpadu produk perikanan			3 kali	100	3 kali	125	3 kali	125	3 kali	150	3 kali	150	15 kali	650	Dislutkan			
					Pelatihan Teknologi Pengemasan			3 kali	100	3 kali	125	3 kali	125	3 kali	150	3 kali	150	15 kali	650	Dislutkan			
					Fasilitasi PIRT dan Halal			30 Kelp	150	30 Kelp	175	30 Kelp	175	30 Kelp	200	30 Kelp	200	150 klp	900	Dislutkan			
					Bantuan Kemasan			30 Kelp	150	30 Kelp	175	30 Kelp	175	30 Kelp	200	30 Kelp	200	150	900	Dislutkan			
				Pengembangan jaringan dan distribusi pemasaran,	Promosi dan fasilitasi pemasaran,			12 Kali,	60	12 Kali,	60	12 Kali,	60	12 Kali,	60	12 Kali,	60	60 kali	300	Dislutkan			
					Pembinaan Pemasaran,			210 orang	105	210 orang	105	210 orang	105	210 orang	105	210 orang	105	1050 orang	525	Dislutkan			
					Layanan Informasi Pasa			12 bulan	120	12 bulan	120	12 bulan	120	12 bulan	120	12 bulan	120	60 bulan	600	Dislutkan			
					Lomba menu Serba Ikan			2 Kali	20	2 Kali	20	2 Kali	20	2 Kali	20	2 Kali	20	10	100	Dislutkan			
				GEMARIKAN	Kampanye GEMARIKAN	1500 Orang	250	1500 Orang	250	1500 Orang	250	1500 Orang	250	1500 Orang	250	1500 Orang	250	9000	1.250	Dislutkan			
				Pengembangan Inkubator Mina Bisnis	Peningkatan kelas UKM			1 Kali	100	1 Kali	100	1 Kali	100	1 Kali	100	1 Kali	100	5 kali	500	Dislutkan			
				Fasilitasi sarana dan prasarana pemasaran	- Akses jalan Pasar Ikan Ujunggenteng dan Cisolok					1 Km	200						1 km	200	Dislutkan				
					- Rehabilitasi pasara ikan					10 unit	200	10 Unit	200				20 Unit	400	Dislutkan				
					Pembangunan/Pengembangan Pasar ikan					10 Unit	1000						10 unit	1.000	Dislutkan				
					Sarana pemasaran						26 Paket	260	20 Paket	200	36 Paket	200	82 paket	660	Dislutkan				
				Pembinaan Nelayan	Pertemuan Nelayan,			6 Kali Pertemuan	50.250	12 Kali Pertemuan	100,5	12 Kali Pertemuan	100,5	12 Kali Pertemuan	100,5	12 Kali Pertemuan	100,5	54 kali	452	Dislutkan			
				Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi SEHAT	Sertifikat SEHAT Nelayan					200 sertifikat	44,550	200 sertifikat	44,550	200 sertifikat	44,550	200 sertifikat	44,550	400 Sertifikat	178	Dislutkan			
				Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi Listrik	Sambungan Listrik Murah					350 sambungan	44,550	350 sambungan	44,550	350 sambungan	44,550	350 sambungan	44,550	1400 sambungan	178	Dislutkan			
				Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi Rutilahu	Rumah Layak Huni					3 Kali Pertemuan	25,125	3 Kali Pertemuan	25,125	3 Kali Pertemuan	25,125	3 Kali Pertemuan	25,125	12 kali pertemuan	101	Dislutkan			
				intensifikasi usaha budidaya	percontohan intensifikasi budidaya mas, nila, lele, patin, bawal, ikan hias, lainnya					5 klp	250	3 klp	275	2 klp	100	2 klp	100	12 klp	725	Dislutkan			
				Pengembangan Minapolitan melalui Optimalisasi UPTD Pasar Ikan	Meningkatnya Pelayanan Pasar Ikan	40	40	165	40	170	45	175	50	180	55	185	60	190	60	900	Dislutkan		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Ikan			1 Paket	800								1 Paket	800					
				Revitalisasi Pasar Ikan Cibaraja	Bangunan dan struktur			1 Paket	350	1 paket	18.000						1 paket	18.350	Dislutkan				



					Water treatment dan waste management system							1 paket	17.000						1 paket	17.000	Dislutkan	
					Mechanic Electric Solar cell energy							1 paket	10.000						1 paket	10.000	Dislutkan	
					Network system							1 paket	200						1 paket	200	Dislutkan	
					Electronic hardware							1 paket	500						1 paket	500	Dislutkan	
					Meubelair							1 paket	300						1 paket	300	Dislutkan	
				Diversifikasi Produk Perikanan dan Diversifikasi kemasan	Pelatihan Diversifikasi Produk Perikanan dan Diversifikasi kemasan			3 kali	100	3 kali	125	3 kali	150	3 kali	175	3 kali	200	15 kali	750		Dislutkan	
				Peningkatan kapasitas produksi produk perikanan	Bantuan Sarana dan Prasarana produk perikanan			1 paket	300	2 paket	600	2 paket	600	2 paket	700	2 paket	700	9 paket	2.900		Dislutkan	
					Renovasi Sentra Pengolahan Ikan			1 Paket	2.000	1 Paket	500	1 Paket						3 paket	2.500		Dislutkan	
				Forum KUB dan Lemaga Keuangan Mikro	Kerjasama dengan Perusahaan					3 Kali pertemuan	25,125	Kali pertemuan	25,125	Kali pertemuan	25,125	Kali pertemuan	25.125.000	kali pertemuan	25.125.075		Dislutkan	
				Fasilitasi Rekomendasi SIUP, SIPI, dan SIKPI	Rekomendasi SIUP, SIPI, dan SIKPI				50 Rekomendasi	50	50	50	50	50	50	50	50	200	200		Dislutkan	
				Cek Fisik Kapal	Hasil Pengukuran Cek fisik kapal					100 kapal	26,040	100 kapal	26,040	100 kapal	26,040	100 kapal	26,040	400	104		Dislutkan	
				Temu Usaha	Terjalannya pola kemitraan dalam pengembangan usaha			30 Orang dan minimal 1 kerjasama/ kemitran	50	30 Orang dan minimal 1 kerjasama/ kemitran	50	30 Orang dan minimal 1 kerjasama/ kemitran	50	30 Orang dan minimal 1 kerjasama/ kemitran	50	30 Orang dan minimal 1 kerjasama/ kemitran	50	150 orang dan 5 kerjasama	250		Dislutkan	
				Pertemuan para eksportir dan pelayanan pembuatan rekomendasi	Terjalannya silaturahmi para ekportir kab sukabumi,			15 Orang	30	15 Orang	30	15 Orang	30	15 Orang	30	15 Orang	30	45 orang	150		Dislutkan	
				Penciptaan pelaku usaha baru	pelatihan Teknologi Pengolahan Ikan			3 kali	150	3 kali	150	3 kali	150	3 kali	210	3 kali	210	15 kali	870		Dislutkan	
					Bantuan peralatan pengolahan ikan			3 paket	300	3 paket	300	3 paket	300	3 paket	300	3 paket	300	15 paket	1.500		Dislutkan	
				Peningkatan kelembagaan bagi UMKM	Sosialisasi kelembagaan bagi UMKM			3 kali	150	3 kali	150	3 kali	150	3 kali	210	3 kali	210	15 kali	870		Dislutkan	
					Fasilitasi koperasi bagi UMKM			3 kali	150	3 kali	150	3 kali	150	3 kali	210	3 kali	210	15 kali	870		Dislutkan	
				Pendataan Pemasar Ikan	Survey langsung terhadap pemasar produk perikanan			50 pemasar	30	50 pemasar	30	50 pemasar	30	50 pemasar	30	50 pemasar	30	250 pemasar	150		Dislutkan	
	Terwujudnya sentra perikanan budidaya air tawar, dan pengolahan hasil perikanan			Pengembangan cluster produk perikanan	Sosialisasi Cluster Produk Perikanan			2 kali	200	2 kali	300	2 kali	400	2 kali	400	2 kali	500	10 kali	1.800		Dislutkan	
					Bantuan peralatan pengolahan ikan			2 kali	400	2 kali	400	2 kali	500	2 kali	500	2 kali	500	10 kali	2.300		Dislutkan	
					Pembangunan cluster perikanan			2 kali	500	2 kali	500	2 kali	500	2 kali	500	2 kali	500	10 kali	2.500		Dislutkan	
					Pelatihan dan diseminasi Teknologi pengolahan hasil			3 kali	150	5 kali	250	5 kali	250	5 kali	250	5 kali	250	23 kali	1.150		Dislutkan	

				Fasilitasi kewirasahaan	Terbentuknya wirausahawan baru				10 Wirausahawan	20 Wirausahawan	10 Wirausahawan	20 Wirausahawan	10 Wirausahawan	20 Wirausahawan	10 Wirausahawan	20 Wirausahawan	50	100	Dislutkan		
				Dana Alokasi Khusus	tersedianya sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan		1 paket	7000	1 paket	5000	1 paket	5000	1 paket	5000	1 paket	5000	1 paket	25.000			
				Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	pembinaan Pengolah/pemasar dan sarana/prasarana Pengolahan		1 Paket	400									1 Paket	400			
				Pengembangan Minapolitan melalui Optimalisasi UPTD Konservasi Penyus	Operasional UPTD Konservasi		1 Paket	600									1 Paket	600			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA,		4 Dokumen	100	4 Dokumen	100	4 Dokumen	100	4 Dokumen	100	4 Dokumen	100	4 Dokumen	600			
					Dokumen Rencana Minapolitan Perikanan Budidaya Kabupaten Sukabumi		1 Dokumen	450									1 Dokumen	450			
					Deliniasi Kawasan Budidaya				1 Dikumen	300							1 Dikumen	300			
				Penyusunan IKM dan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	data Statistik dan IKM		2 Dokumen	150	2 Dokumen	150	2 Dokumen	150	2 Dokumen	150	2 Dokumen	150	2 Dokumen	900			
				Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan (Silpa DAK Reguler Th. 2015)	tersedianya sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan		1 paket	300													
	Meningkatnya produksi, nilai tambah produk perikanan serta sarana prasarana perikanan	Produksi, nilai tambah produksi dan sarpras perikanan meningkat		<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>																	
				Penyediaan Data Statistik Perikanan Tangkap	Laporan Data Statistik Perikanan Tangkap			1 Laporan	12	1 Laporan	12	1 Laporan	12	1 Laporan	12	1 Laporan	12	5 lap	60	Dislutkan	
				Pemulihan dan Pemanfaatan SDKP Secara Terpadu dan Berkelanjutan di Perairan Umum Daratan	Jumlah Peserta sosialisasi pengelolaan PUD			150 Orang	50	150 Orang	50	150 Orang	50	150 Orang	50	150 Orang	50	450 orang	250	Dislutkan	
					sosialisasi jenis ikan langka dan dilindungi			150 Orang	50	150 Orang	50	150 Orang	50	150 Orang	50	150 Orang	50	750 orang	250	Dislutkan	
					Restocking di Perairan Umum Daratan			500.000 Ekor	200	500.000 Ekor	200	500.000 Ekor	200	500.000 Ekor	200	500.000 Ekor	200	2.500.000 ekor	1.000	Dislutkan	
					Sarana dan Prasarana CBF			1 Paket	150	1 Paket	150	1 Paket	150	1 Paket	150	1 Paket	150	5 paket	750	Dislutkan	
				Pencatatan Armada penangkapan Ikan	Laporan Data Armada Penangkapan Ikan			500 kapal	100	500 kapal	100	500 kapal	100	500 kapal	100	500 kapal	100	2500 kpl	500	Dislutkan	

				Pengembangan Minapolitan melalui Optimalisasi UPTD Tempat Pelelangan ikan	Meningkatnya proses Penyelenggaraan Pelelangan		300	650	350	850	375	1.000	400	1.100	425	1.200	450	1.250	450	5.400	Dislutkan		
				fasilitasi sertifikasi cbit					20 unit	80	20 unit	80	20 unit	80	20 unit	80			80 unit	320	Dislutkan		
				Fasilitas Sarana Air Bersih	Sarana Air Bersih (fisik)				1 kegiatan	25	1 Kegiatan	25	1 Kegiatan	25	1 Kegiatan	25	1 Kegiatan	25	5 keg	125	Dislutkan		
				Pembangunan Drainase PPI Cikembang					1 Kegiatan	300									1 krg	300	Dislutkan		
				Pembangunan/Renovasi MCK	Sarana MCK (Fisik)										1 Kegiatan	50	1 Kegiatan	25	2 keg	75	Dislutkan		
				Pembangunan Talud	Talud (fisik)				1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	100							2 keg	200	Dislutkan		
				Pengurangan bahu jalan PPI Cikembang	bahu jalan ppi cikembang (fisik)				1 Kegiatan	150									1 keg	150	Dislutkan		
				Pemasangan Turap penahan tanah Lahan Cikembang	tpi lahan 9fisik)				1 Kegiatan	200									1 keg	200	Dislutkan		
				Pembangunan Balai pertemuan nelayan dan Perengkapannya di Pos PPI Cikembang	Balai Pertemuan								1 Unit	300					1 keg	300	Dislutkan		
				Pembangunan Pos PPI	pos ppi (fisik)								1 Kegiatan	350			1 Kegiatan	100	2 keg	450	Dislutkan		
				Rapat Koordinasi Minapolitan	opd tim pengelolaan minapolitan terkoordinasi				2 Kegiatan	8	2 Kegiatan	8	2 Kegiatan	8	2 Kegiatan	8	2 Kegiatan	8	10 keg	40	Dislutkan		
				Rapat Koordinasi BBM	pihak-pihak yang terlibat BBM terkoordinasi				2 Kegiatan	8	2 Kegiatan	8	2 Kegiatan	8	2 Kegiatan	8	2 Kegiatan	8	10 keg	40	Dislutkan		
				Fasilitas Jalan Produksi Loji sangrawayan ( ± 3 KM )	Tersedianya jalan Produksi				3 km	3.000									3 km	3.000	Dislutkan		
				Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Cool Box)	Alat Bantu Penangkapan Ikan (Cool Box)				100 Unit	100			100 Unit	100			100 Unit	100	300 unit	300	Dislutkan		
				Fasilitas Alat Bantu Penangkapan Ikan GPS dan Fishfinder	Alat bantu penangkapan ikan gps dan fishfinder						20 Unit	200							20 unit	200	Dislutkan		
				Fasilitas Lift Jacket	Lift Jacket						200 Unit	50				200 Unit	50			400 unit	100	Dislutkan	
				Kaji Terap Teknologi Penangkapan Ikan, Pengelolaan PPI	Meningkatnya pengetahuan nelayan, Pengelolaan PPI				12 Nelayan, 8 Orang Pendamping	80			15 Nelayan, 5 Orang Pendamping	80			15 Nelayan, 5 Orang Pendamping	80	42 Nelayan, 18 org pendamping	240	Dislutkan		
				Pelatihan/Magang Nelayan	Alih Teknologi Penangkapan Ikan					10 Orang	30				10 Orang	30			20 orang	60	Dislutkan		
				<b>Proram Pengembangan Perikanan Budidaya</b>																			
				Fasilitai sarpras budidaya					20 paket	1.500	20 paket	1.500	20 paket	1.500	20 paket	1.500	20 paket	1.500	100 paket	7.500	Dislutkan		
				Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	Pembinaan pembudidaya dan sarana budidaya			1 paket	400										1 paket	400			
				Peningkatan Produktifitas Perikanan budidaya melalui PIK	sarana budidaya			1 paket	250	1 Paket	100								1 Paket	350			

				Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan	kajiterap			40 ora	80								40 orang	80	Dislutkan			
					pelatihan dan pembinaan			200 orang	150	200 orang	150,00	200 orang	150,00	200 orang	150,00	200 orang	150,00	1000 orang	750	Dislutkan		
				fasilitasi gerakan pakan ikan mandiri						8 kelompok	400						8 klp	400	Dislutkan			
				perbaikan kualitas induk ikan	Nila			100	400	100	400	75	300	75	300	50	200		1.600	Dislutkan		
					mas			20	80	20	80	20	80	20	80	20	80		400	Dislutkan		
					lele			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		250	Dislutkan		
					patin			5	30			5	30					60	Dislutkan			
					bawal			5	30			5	30					60	Dislutkan			
					lainnya			10	60	5	30	5	60					150	Dislutkan			
				fasilitasi sarpras UPR	saprodi			20	400	20	400	20	400	20	400	20	400		2.000	Dislutkan		
				Fasilitasi HSRT	HSRT			10	1.200	5	600	5	600					2.400	Dislutkan			
				pelatihan dan pembinaan	pelatihan berdasarkan komoditas			200 orang	150	200 orang	150	200 orang	150	200 orang	150	200 orang	150,00		750	Dislutkan		
				pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	monitoring kualitas air dan lingkungan			100 lokasi	150	100 lokasi	150	100 lokasi	150	100 lokasi	150	100 lokasi	150		750	Dislutkan		
					fasilitasi peralatan uji kualitas air			20 upr	20	20 upr	20								40	Dislutkan		
					pelatihan kesehatan ikan dan lingkungan			200 orang	150	200 orang	150	200 orang	150	200 orang	150	200 orang	150,00		750	Dislutkan		
				Pegembangan Minapolitan melalui Optimalisasi UPTD BBI	Meningkanya Pelayanan BBI		100	700	100	700	125	800	150	900	180	1000	200	1100	200	4.500	Dislutkan	
					Pengadaan Lahan BBI Tonjong		4 Hektar	3500										4 Hektar	3500			
				Pembangunan Balai Benih Ikan Tonjong	Terbangunnya Kolam Pendederan Ikan Tahap I dan II					8 kolam	2.000	8 Kolam	2000						4.000	Dislutkan		
					Terbangunan Saluran Air					1 LS	500								500	Dislutkan		
					Pembangunan Bak Tandon dan Filter air					2 Unit	100								100	Dislutkan		
					Pembangunan Gudang Pakan, Pupuk, Kapur, Peralatan dan Ruang Mesin					4 Unit	200								200	Dislutkan		
					Pengadaan Sarana Produksi Perikanan dan Mesin					1 Paket	200								200	Dislutkan		
					Pembangunan Kantor dan Mess Karyawan					2 Unit	400								400	Dislutkan		
					Pembangunan Jalan Lingkungan & Penerangan					1 LS	400								400	Dislutkan		
					Pembangunan instalasi air bersih					1 LS	100								100	Dislutkan		
					Pengadaan Mebeleir					1 Paket	50								50	Dislutkan		
					Pembangunan Shelter Penjualan ikan							1 LS	200						200	Dislutkan		
					-Pengadaan Induk Ikan							1 paket	25						25	Dislutkan		
					Pembangunan Hatchery Indoor dan Outdoor									1 Paket	1.000				1.000	Dislutkan		
					Pengadaan peralatan hatchery									1 Paket	250				250	Dislutkan		

					Pembangunan Ruang Pertemuan									1 Paket	300					300	Dislutkan	
					Penataan Halaman & lahan Parkir									1 Paket	200					200	Dislutkan	
				perbaikan kualitas induk ikan hias	fasilitasi induk ikan hias			10 paket	250	10 paket	250	10 paket	250	10 paket	250		10 paket		1.000	Dislutkan		
				fasilitasi sarpras pembudidaya ikan hias				10 paket	600	10 paket	600	10 paket	600	10 paket	600		10 paket		2.400	Dislutkan		
				peningkatan kapasitas pembudidaya ikan hias	kontes			4 event	300	4 event	300	4 event	300	4 event	300		4 event		1.200	Dislutkan		
					kaji terap			40 rang	90										90	Dislutkan		
					fasilitasi keikutsertaan			10 event	100	10 event	100	10 event	100	10 event	100		10 event		400	Dislutkan		
					pelatihan dan pembinaan			100 orang	75	100 orang	75	100 orang	75	100 orang	75		100 orang		300	Dislutkan		
				pelatihan dan pembinaan srtifikasi				20 unit	30	20 unit	30	20 unit	30	20 unit	30		20 unit		120	Dislutkan		
				fasilitasi sertifikasi cbib				20 unit	80	20 unit	80	20 unit	80	20 unit	80		20 unit		320	Dislutkan		
				pelatihan dan pembinaan srtifikasi				20 unit	30	20 unit	30	20 unit	30	20 unit	30		20 unit		120	Dislutkan		
				fasilitasi sertifikasi cbib				20 unit	80	20 unit	80	20 unit	80	20 unit	80		20 unit		320	Dislutkan		
				Penyedjian Infrastruktur Budidaya	Normalisasi Saluran Air					1 Paket	200	1 Paket	200						400	Dislutkan		
					Pembangunan Jalan					1 Paket	200	1 Paket	200						400	Dislutkan		
					Rehabilitasi Kolam					1 Paket	400	1 Paket	400						800	Dislutkan		